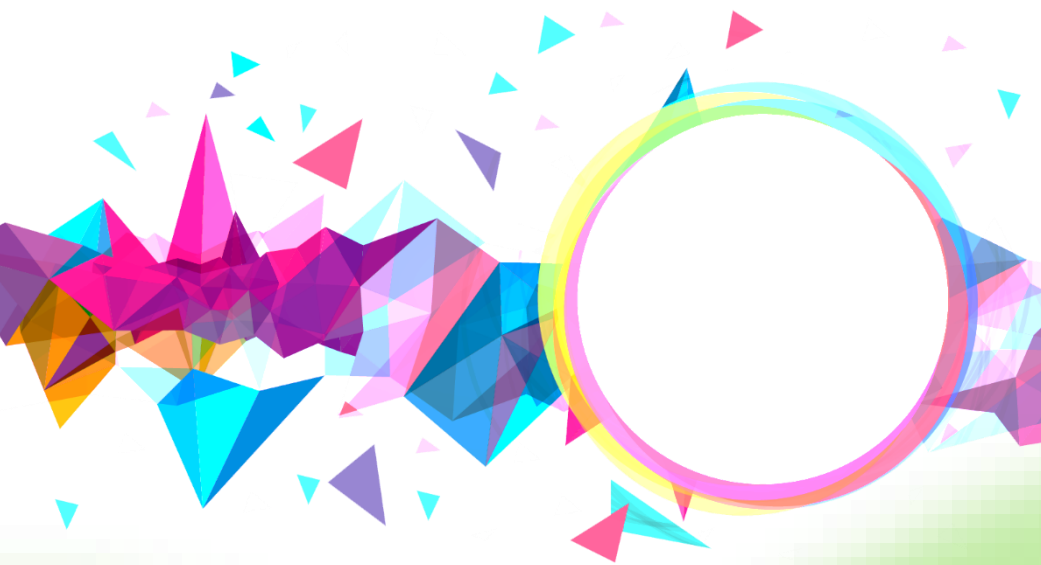




PEMERINTAH PROVINSI NTB



LAPORAN HASIL EVALUASI RKPD TAHUN 2025 (Triwulan IV)



BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus refleksi atas pelaksanaan pembangunan daerah selama Tahun 2025, khususnya pada Triwulan IV. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja pembangunan daerah, baik dari aspek realisasi program, kegiatan, maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, guna memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan serta sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan pada periode selanjutnya. Melalui laporan ini diharapkan dapat teridentifikasi berbagai capaian, permasalahan serta tantangan yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTB.

Mataram, April 2026

Kepala



Said Nelly Yuniarti, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197606151994122001

RINGKASAN

Capaian kinerja pembangunan Provinsi NTB hingga Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan gambaran umum bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini tercermin dari capaian indikator makro pembangunan, indikator kinerja utama serta indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci yang secara umum menunjukkan tren positif meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal.

Berdasarkan indikator sasaran pokok pembangunan daerah, kinerja ekonomi Provinsi NTB menunjukkan capaian yang belum sesuai target dengan target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,22 persen dari target 6,00 persen. PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp35,80 juta dengan capaian Rp.33,67 juta (94,05 persen). Kontribusi PDRD Provinsi NTB terhadap PDRB nasional telah tercapai sebesar 0,82 persen dari target sebesar 0,84 persen. Dari aspek kesejahteraan, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 11,68–12,18 persen dengan capaian 11,38 persen, melebihi target. Rasio gini mencapai 0,364 melebihi target sebesar 0,369–0,373 yang mencerminkan upaya pengurangan ketimpangan pendapatan. Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan sebesar 0,56 sebagai indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun hingga akhir 2025 data tersebut belum tersedia. Selain itu, aspek lingkungan yang dicerminkan melalui indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK menunjukkan kinerja yang belum memuaskan dengan capaian hanya 4,04 persen dari target sebesar 15,31 persen. Selanjutnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan catatan yang baik dengan capaian 77,40 point dari target 76,19 poin. Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan pada kisaran 2,19–2,79 persen telah terealisasi sebesar 3,05 persen sedangkan dari aspek daya saing, kontribusi industri pengolahan, indeks inovasi daerah, indeks daya saing daerah serta indeks ekonomi biru juga menunjukkan arah peningkatan yang signifikan.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) memperlihatkan konsistensi antara sasaran makro dengan pelaksanaan program pembangunan. Pertumbuhan ekonomi baik dengan maupun tanpa sektor tambang menunjukkan capaian yang cukup tinggi yang didukung oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja dan inklusi keuangan yang ditargetkan mencapai 80,51 persen. Indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, pengangguran dan rasio gini menunjukkan arah perbaikan meskipun masih memerlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dari sisi sektoral, peningkatan kontribusi industri pengolahan, penguatan ekonomi kreatif serta peningkatan jumlah wisatawan mancanegara menjadi indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah. Di sisi lain, indikator tata kelola pemerintahan seperti indeks reformasi birokrasi dan indeks inovasi daerah juga menunjukkan peningkatan yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang lebih efektif, transparan dan inovatif.

Pada aspek Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian pembangunan dapat dilihat secara lebih komprehensif melalui empat dimensi utama. Pada aspek geografi dan lingkungan, peningkatan indeks ketahanan pangan, akses air minum, sanitasi serta pengelolaan sampah menunjukkan adanya perbaikan layanan dasar, meskipun masih terdapat tantangan dalam cakupan layanan yang merata. Indeks Risiko Bencana yang cukup tinggi menunjukkan perlunya penguatan kapasitas mitigasi bencana sementara peningkatan IKLH mencerminkan upaya pengelolaan lingkungan yang semakin baik.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan usia harapan hidup serta penurunan prevalensi stunting menunjukkan hasil yang cukup positif. Namun demikian, capaian di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial masih memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan.

Pada aspek daya saing daerah, peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan, pertumbuhan sektor pertanian serta peningkatan indeks inovasi daerah dan indeks ekonomi hijau dan biru menunjukkan bahwa transformasi ekonomi daerah mulai berjalan ke arah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Upaya penguatan

kewirausahaan dan pemanfaatan energi terbarukan juga menjadi faktor penting dalam mendukung daya saing daerah di masa depan.

Sementara itu, pada aspek pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan, capaian indikator seperti nilai SAKIP, indeks reformasi birokrasi, opini WTP dari BPK serta peningkatan indeks pelayanan publik menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas tata kelola pemerintahan. Meski demikian, penguatan sistem pemerintahan berbasis digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik masih menjadi tantangan yang perlu terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pembangunan Provinsi NTB Tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang cukup dalam berbagai aspek pembangunan. Namun demikian masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian terutama dalam upaya penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah serta penguatan ketahanan terhadap risiko lingkungan dan bencana. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, terarah dan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL EVALUASI RKPD TAHUN 2025	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Sasaran.....	3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	3
BAB II PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2025	5
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	5
2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	15
2.3 Target Pembangunan Daerah Tahun 2025	20
BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN IV TAHUN 2025	33
3.1 Capaian Indikator Makro Daerah Berdasarkan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025	33
3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	35
3.1.2 PDRB per Kapita	39
3.1.3 Kontribusi PDRB Provinsi	40
3.1.4 Tingkat Kemiskinan	41
3.1.5 Rasio Gini	42
3.1.6 Indeks Modal Manusia (IMM)/ Indeks Pembangunan Manusia	43
3.1.7 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).....	45
3.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	46
3.1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka	47
3.1.10 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	48
3.1. 11 Indeks Inovasi Daerah.....	50
3.1.12 Indeks Daya Saing Daerah.....	51
3.1.13 Indeks Ekonomi Biru Indonesia	52

3.2	Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Daerah Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2025-2029	53
3.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.....	87
3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB	87
3.3.2	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi NTB.....	109
BAB IV PENUTUP.....		114

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	Target Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025	8
Tabel 2	Tujuan dan Sasaran RKPD Perubahan Tahun 2025.....	9
Tabel 3	Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	16
Tabel 4	Kegiatan Prioritas Utama Program Unggulan.....	18
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB	21
Tabel 6	Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Provinsi NTB Tahun 2025 .	22
Tabel 7	Capaian Sasaran Pembangunan Daerah NTB Tahun 2025.....	34
Tabel 8	Laju Pertumbuhan Menurut Jenis Lapangan Usaha.....	37
Tabel 9	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran	38
Tabel 10	Perkembangan IPM Provinsi NTB 2021-2025.....	44
Tabel 11	Penurunan Emisi GRK Tahunan Tahun 2025 Menurut Sub Sektor	45
Tabel 12	Target dan Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Daerah Tahun 2025 Provinsi NTB.....	58
Tabel 13	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025	88
Tabel 14	Predikat Kinerja Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2025	90
Tabel 15	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2025	92
Tabel 16	Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2025	118
Gambar 1	Triple Agenda Pembangunan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029	6
Gambar 2	Visi, Sasaran Visi, Misi dan 10 Program Unggulan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029	7
Gambar 3	10 Program Unggulan sebagai Program Prioritas Daerah Provinsi NTB	17
Gambar 4	Tingkat Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Daerah NTB	34
Gambar 5	Pertumbuhan Ekonomi NTB Dengan Tambang Tahun 2025	35
Gambar 6	Pertumbuhan Ekonomi NTB Dengan Tambang Tahun 2025	37
Gambar 7	PDRB Per Kapita Provinsi NTB Tahun 2021-2025	39
Gambar 8	Kontribusi PDRB Menurut Provinsi Tahun 2025	40
Gambar 9	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin NTB Tahun 2021-2025	42
Gambar 10	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Provinsi NTB	43
Gambar 11	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB dan Nasional	48
Gambar 12	Nilai dan Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi NTB	49
Gambar 13	Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTB.....	51
Gambar 14	Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Regional NTB-Bali-NTT	52
Gambar 15	Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Tahun 2025 (Jumlah Indikator : 25).....	55
Gambar 16	Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pembangunan Tahun 2025 (Jumlah Indikator : 53)	56
Gambar 17	Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 (Jumlah Indikator : 24).....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2025 Triwulan IV merupakan bentuk pertanggungjawaban dan refleksi atas kinerja pembangunan daerah sepanjang tahun berjalan. Laporan ini menjadi dokumen krusial yang tidak hanya memotret capaian tetapi juga menjadi fondasi bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya serta penyesuaian strategi pembangunan jangka menengah dan panjang. Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat strategis dan penuh dinamika bagi Provinsi NTB. Sebagai tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025–2045 yang selaras dengan RPJPN Nasional 2025–2045, tahun ini menandai transisi dalam siklus perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan diperlukan untuk mengetahui kemajuan, pencapaian hasil dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dijadikan untuk perbaikan rencana pembangunan pada masa mendatang. Dalam Pasal 261, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengatur bahwa evaluasi hasil RKPD lingkup provinsi mencakup rencana program dan kegiatan prioritas daerah, penilaian realisasi antara rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan dengan capaian indikator kinerja serta realisasi penyerapan dana APBD dibandingkan target RKPD.

Evaluasi pelaksanaan RKPD secara berkala dilakukan tidak hanya untuk mengetahui progress capaian pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan tetapi juga dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan. Sebagai tambahan, penilaian juga dilakukan pada realisasi dari target indikator sasaran pokok, realisasi indikator tujuan dan sasaran, realisasi

indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci perangkat daerah. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan dalam penyusunan RKPD provinsi NTB tahun berikutnya.

Dalam rangka menjalankan amanat dan tanggung jawab yang diamanatkan tersebut maka BAPPEDA Provinsi NTB perlu menyusun laporan hasil evaluasi RKPD Provinsi NTB Triwulan IV Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan evaluasi RKPD tahun 2025 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Gubernur NTB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD Provinsi NTB Triwulan IV tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan gambaran capaian realisasi realisasi dari target indikator sasaran pokok, realisasi indikator tujuan dan sasaran daerah, realisasi indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci perangkat daerah;
- b. Memberikan gambaran capaian realisasi kinerja antara rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan serta realisasi penyerapan dana APBD dibandingkan target RKPD;
- c. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
- d. Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Provinsi NTB Triwulan IV tahun 2025 ini adalah untuk mengukur capaian indikator sasaran pokok, realisasi indikator tujuan dan sasaran daerah, realisasi indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci perangkat daerah, serta capaian program/kegiatan/Sub kegiatan pada perangkat daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sesuai dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.5 Sistimatika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Provinsi NTB Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan sistimatika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran dan sistimatika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2025. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2025. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan IV Tahun 2025. Bab ini berisi capaian indikator sasaran pokok, realisasi indikator tujuan dan sasaran daerah, realisasi indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci perangkat daerah, serta capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.
- Bab V : Penutup

BAB II

PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2025

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2025—sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 25 Tahun 2024 dan telah diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025—merupakan dokumen perencanaan strategis yang menandai tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Memasuki periode awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, melalui Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pendekatan strategis pembangunan jangka menengah melalui triple agenda pembangunan daerah yaitu: pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata mendunia.

Triple agenda ini menjadi arah utama dalam penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang bersifat tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan daya saing daerah serta keberlanjutan lingkungan dan sosial. Pengentasan kemiskinan ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan, mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah di Provinsi NTB. Fokus utama pada agenda ini adalah Pemenuhan layanan dasar, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan ketimpangan, implementasi prinsip GEDSI, pengurangan risiko bencana, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, akses perlindungan sosial adaptif, ketahanan terhadap risiko dan kerentanan.

Pada pengutan ketahanan pangan yaitu sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, NTB diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian,

peternakan, dan perikanan secara terpadu. Fokus utama pada agenda ini adalah Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan subsektornya, terwujudnya ekosistem industri pertanian dengan sistem agribisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha tani dan nelayan, diversifikasi pangan lokal, infrastruktur dan logistik pangan, akses teknologi dan inovasi, regenerasi petani dan nelayan, ketahanan terhadap risiko dan krisis pangan.

Selanjutnya pariwisata menjadi wajah dan masa depan pembangunan NTB, yang diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja serta promosi budaya dan lingkungan NTB secara global. Fokus dari agenda ini meliputi Peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata, aksesibilitas dan konektivitas, investasi pariwisata berkualitas, MICE, sport tourism kelas dunia, wisata petualangan, ekraf, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal, kualitas SDM dan layanan wisata, digitalisasi dan promosi pariwisata global.

Gambar 1 Triple Agenda Pembangunan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Inklusif, NTB Agro Maritim, NTB Pariwisata Berkualitas, E-Mania (Ekraf Makmur Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good & Smart Governance dan NTB Connected.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2025 dalam perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator sasaran pokok pembangunan daerah yang telah direncanakan pada dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Adapun target indikator sasaran pokok pembangunan daerah di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Target Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025
			Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.00
2	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	35.80
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.84
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,68-12,18
5	Rasio Gini	Poin	0,369-0,373
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0.56
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	15.31
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76.19
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,19-2,79
10	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	4.21
11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	76.50
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.55
13	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	54.53

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2025

Selanjutnya penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 dijabarkan disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 Tujuan dan Sasaran RKPD Perubahan Tahun 2025

No.	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Visi : NUSA TENGGARA BARAT BANGKIT BERSAMA MENUJU PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR MENDUNIA						
1 Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif						
	Tujuan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif	1 Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54 (2023)	0.56
			2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	65.51	66.71
	Sasaran 1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	1 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	7.87	8,6-8,63
			2 Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.98	14,1-14,13
			3 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9.44	10.02
			4 Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:			
			a) Literasi Membaca	%	NA	10
			b) Numerasi	%	NA	0,00- 10,00
			5 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:			
			a) Literasi Membaca	%	NA	26,24-28,74
			b) Numerasi	%	NA	22,68-25,18
	Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72.25	72.92
			2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29.8	21.7
	Sasaran 3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.53	0.517
			2 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60.02	61.70

No.	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Misi 2 : Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan					
	Tujuan 2	Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi :			
			1a - Dengan Tambang	%	5.30	6.00
			1b - NonTambang	%	3.87	6,00 - 6,50
			2 Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.83	0.84
	Sasaran 4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	1 Rasio kewirausahaan Daerah	%	0.12	2.37
			2 Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0.95	0.97
			3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14.20	14.27
	Tujuan 3	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat	1 PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32.28	35.80
	Sasaran 5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	1 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	35,182.00	35,408.24
			2 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.73	2,19-2,79
	Sasaran 6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	1 Inklusi Keuangan	%	NA	88.70
	Tujuan 4	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali	1a Tingkat Kemiskinan	%	11.91	11,68-12,18
			1b Tingkat Kemiskinan Ekstrem NTB	%	2.04	1.64
			2 Rasio Gini	Poin	0.364	0,369-0,373
			3 Tingkat Inflasi	%	1,28	3-3,7
	Sasaran 7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	1 Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	46.00
	Sasaran 8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	1 Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.44	78.83
	Sasaran 9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	1 Indeks Desa	(%)	77.08	77.88

No.	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
3	Misi 3 : Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan	Sasaran 10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	7.30
		Tujuan 5	Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3.87	4.21
		Sasaran 11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	1	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	%	5.30	5,3 - 6,4
		Sasaran 12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	1	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1.54	3.20
4	Misi 4 : Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga	Tujuan 6	Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif	1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	%	11.45	11.64
				2	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	NA	0.39
		Sasaran 13	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349,447	382,813
				2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.75	2.03
				3	Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%	3.72	3.76
		Tujuan 7	Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,37 (2023)	58,64-58,78
		Sasaran 14	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	1	Indeks budaya literasi	Indeks	(2023) 61.20	64.42
				2	Indeks ekspresi budaya	Indeks	39.74 (2023)	44.48
				3	Indeks warisan budaya	Indeks	48.37 (2023)	50.17

No.	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4 Indeks ekonomi budaya	Indeks	41.92 (2023)	44.26
		Tujuan 8 Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga	1 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	53,67 (2023)	53.94
			2 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0.345	0.346
	Sasaran 15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	69.68	70.18
			2 Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)	(43 medali)	9,3 (47 medali)
			3 Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	%	100	100
5 Misi 5 : Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan						
		Tujuan 9 Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana	1 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113.64	135.41
	Sasaran 16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	1 Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.56	0.59
		Tujuan 10 Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	1 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	NA	0.536
			2 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	NA	15.31
	Sasaran 17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.78	76.19
	Sasaran 18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	1 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0.327	0.331
			2 Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik	%	0.05	0.10
	Sasaran 19	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	1 Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	192.23
			2 Konsumsi Listrik per kapita	kWh	709.00	751.00
		Tujuan 11 Terwujudnya Investasi Berkelanjutan	1 Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	31.8	36.9
	Sasaran 20	Meningkatnya Realisasi Investasi	1 Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	54.55	61.09

No.	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
6	Misi 6 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan						
	Tujuan 12	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan	1	Indeks Kemantapan Infrastruktur	Indeks	74.96	76.35
	Sasaran 21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	75.83	76.21
			2	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67.74	71,68-71,7
			3	Rasio Konektivitas	Rasio	0.82	0.83
	Tujuan 13	Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	62.17	63.05
	Sasaran 22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang		Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang	%	83.13	83.38
7	Misi 7 : Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah						
	Tujuan 14	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif	1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks (Kategori)	77,99 (BB)	78,77 (BB)
			2	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	3.01	3.03
			3	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63.40	76.50
	Sasaran 23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1a	Reformasi Birokrasi General	Skor	68.8	69.49
			1b	Reformasi Birokrasi Tematik	Skor	9.19	9.28
			2	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1.241	1.100
			3	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	91.47	91.50
	Sasaran 24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76.37	75,37-78,63
			2	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	NA	65.00

No.	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3 Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	49.76	75.00
		Sasaran 25 Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	1 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	NA	50
			2 Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	%	94.63	95.58

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2025

2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi NTB pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025–2029, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan fektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan untuk tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada Ranhir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 meliputi:

1. Prioritas Daerah 1, yaitu Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif;
2. Prioritas Daerah 2, yaitu Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan;
3. Prioritas Daerah 3, yaitu Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan;
4. Prioritas Daerah 4, yaitu Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi;
5. Prioritas Daerah 5, yaitu Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim;
6. Prioritas Daerah 6, yaitu Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan;
7. Prioritas Daerah 7, yaitu Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif.

Ketujuh prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran pembangunan daerah pada Ranhir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Prioritas, sasaran dan indicator sasaran pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 dituangkan sebagai berikut.

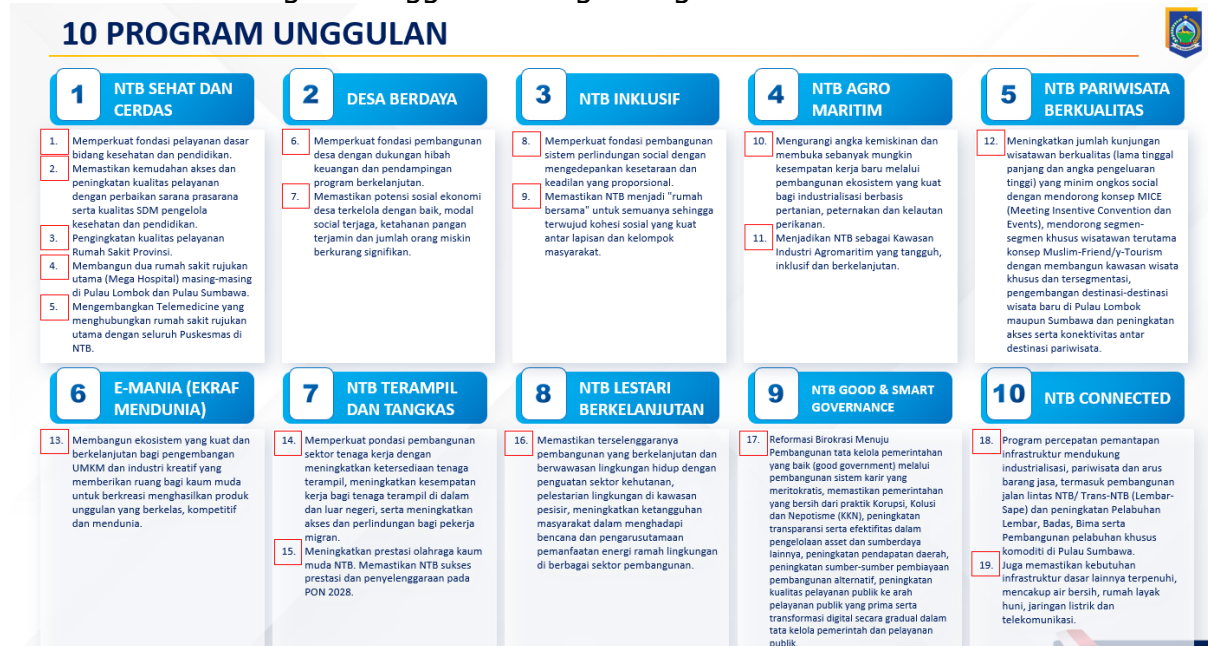
**Tabel 3 Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2025**

PRIORITAS DAERAH (SAPTA CITA) RPJMD 2025-2029	SASARAN
PD 1 : Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif	1. Meningkatnya Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesenjangan Gender
PD 2 : Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan	4. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan 5. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan 7. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat 8. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan 9. Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi
PD 3 : Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan	10. Meningkatnya Kontribusi Industri Pengolahan 11. Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) 12. Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan
PD 4 : Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi	13. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 14. Meningkatnya indeks budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, ekonomi budaya untuk menunjang perbaikan IPK daerah 15. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga
PD 5 : Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim	16. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam melaksanakan mitigasi bencana dan respon terhadap bencana alam, bencana sosial serta perubahan iklim 17. Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas 18. Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem 19. Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan 20. Meningkatnya iklim Investasi Berkelanjutan
PD 6 : Transformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan	21. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Terintegrasi 22. Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang
PD 7 : Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	23. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 24. Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas 25. Meningkatnya Penerapan Peran dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan 10 Program Unggulan (PU) sebagai Program Prioritas Daerah yang bersifat strategis, terukur dan berdampak luas. Program-program ini dirancang sebagai game changer yang inovatif, kolaboratif, dan transformatif dalam menjawab tantangan dan isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat.

Program Unggulan tersebut berfungsi sebagai pengungkit percepatan pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan daerah, yang selaras dengan Sapta Cita Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta berkontribusi langsung pada pencapaian Asta Cita Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Gambar 3 10 Program Unggulan sebagai Program Prioritas Daerah Provinsi NTB



Sumber : RPJMD NTB Tahun 2025-2029

Sebagai instrumen pelaksana dari arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, 10 Program Unggulan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan Kegiatan Strategis Prioritas (KSP) atau Kegiatan Prioritas Utama yang menjadi inti penggerak pelaksanaan program secara nyata di lapangan.

Kegiatan Prioritas Utama ini bersifat lintas sektor, terukur, dan dirancang secara terintegrasi untuk menjawab isu strategis pembangunan daerah seperti

kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pengangguran, keterisolasian wilayah, kualitas sumber daya manusia serta penguatan sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, kelautan, industri kreatif dan pariwisata.

Setiap kegiatan prioritas dirancang sebagai bentuk implementasi langsung dari visi, misi, dan Sapta Cita Kepala Daerah, sekaligus mendukung capaian Asta Cita nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Kegiatan ini juga menjadi jembatan operasional antara kebijakan makro RPJMD dengan perencanaan tahunan melalui Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Tabel 4 Kegiatan Prioritas Utama Program Unggulan

Kegiatan Prioritas	Program Unggulan (PU)	Prioritas Daerah (PD)
Pencegahan dan Penurunan Stunting	PU-1	PD-1
Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular	PU-1	PD-1
Pemenuhan SPM Kesehatan	PU-1	PD-1
Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC)	PU-1	PD-1
Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Provinsi	PU-1	PD-1
Peningkatan Kualitas Pemenuhan SPM Pendidikan	PU-1	PD-1
Penanganan Anak Tidak Sekolah	PU-1	PD-1
Kolaborasi Antar Pusat dan Daerah dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun	PU-1	PD-1
Pemberdayaan Masyarakat melalui PKBM	PU-1	PD-1
Penanganan Sumber Air Bersih	PU-2	PD-2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan)	PU-2	PD-2
Penyediaan Akses Air Bersih ke Rumah Tangga	PU-2	PD-2
Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	PU-2	PD-2
Pembinaan dan Peningkatan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	PU-2	PD-2
Kegiatan Sosialisasi / Pendampingan / Pemberdayaan Masyarakat	PU-2	PD-2
Penegakan Perda Persampahan	PU-2	PD-2
Penanganan Sampah (3R)	PU-2	PD-2
Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Dasar (IPAL Komunal, PSU, Rumah Layak Huni, Posyandu Keluarga)	PU-2	PD-2
Penyediaan Jamkesmas dan Jamkersal	PU-2	PD-2
Edukasi Kespro	PU-2	PD-2
Sosialisasi Peningkatan Usia Perkawinan	PU-2	PD-2
Pencegahan Perkawinan Anak	PU-2	PD-2
Pendampingan dalam Pendidikan Gizi	PU-2	PD-2
Perubahan Perilaku Masyarakat	PU-2	PD-2
Pengentasan Kemiskinan	PU-2	PD-2
Pembangunan Ekosistem Industri Agromaritim	PU-2	PD-2
Pengembangan Pariwisata	PU-2	PD-2
Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial	PU-3	PD-2

Kegiatan Prioritas	Program Unggulan (PU)	Prioritas Daerah (PD)
Mempertahankan Swasembada Beras (Padi), Jagung, Cabe, Cabe Rawit dan Bawang Merah	PU-4	PD-3
Meningkatkan Produktivitas Kedelai, Bawang Putih, Telur, Daging Ayam, Daging Sapi, Gula, dan Minyak Goreng	PU-4	PD-3
Diversifikasi Pangan	PU-4	PD-3
Peningkatan Ekspor Non-Tambang dengan Peningkatan Investasi dan Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor)	PU-4	PD-3
Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah melalui Pengembangan Hilirisasi (Industri Hulu dan Hilir)	PU-4	PD-3
Peningkatan SDM Kepariwisata	PU-5	PD-4
Peningkatan Prasarana Dasar Destinasi Pariwisata Seperti Air Bersih, Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Persampahan serta Penataan Kawasan Permukiman	PU-5	PD-4
Penciptaan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi Kepariwisata	PU-5	PD-4
Pengembangan Daya Tarik Destinasi	PU-5	PD-4
Pengembangan Aksesibilitas mencapai Lokasi Destinasi	PU-5	PD-4
Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Pendukung (Amenitas) Destinasi	PU-5	PD-4
Meningkatkan Ketersediaan Pelayanan Tambahan (Ansilari) pada setiap Destinasi	PU-5	PD-4
Pembangunan Sepuluh Destinasi Pariwisata Terintegrasi	PU-5	PD-4
Pengembangan Wisata MICE	PU-5	PD-4
Pembangunan Kreatif HUB (Kota Kreatif) pada Sepuluh Kabupaten/Kota	PU-6	PD-4
Pembangunan Ekosistem Industri Kreatif pada Sepuluh Kabupaten/Kota	PU-6	PD-4
Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	PU-7	PD-4
Peningkatan Kualitas Atlet serta Kreatifitas dan Prestasi Pemuda	PU-7	PD-4
Upaya Mengatasi Deforestasi dan Degradasi Hutan	PU-8	PD-5
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	PU-8	PD-5
Perhutanan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Lingkar Hutan	PU-8	PD-5
Rehabilitasi Mangrove	PU-8	PD-5
Pengembangan Ekonomi Hijau	PU-8	PD-5
Pengelolaan Persampahan	PU-8	PD-5
Peningkatan Kualitas Air	PU-8	PD-5
Peningkatan Kualitas Udara	PU-8	PD-5
Peningkatan Kualitas Air Laut	PU-8	PD-5
Pengembangan Ekonomi Sirkuler	PU-8	PD-5
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	PU-8	PD-5
Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim	PU-8	PD-5
Peningkatan Penggunaan / Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	PU-8	PD-5
Penanggulangan Bencana	PU-8	PD-5
Pembangunan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Berkelanjutan	PU-8	PD-5
Pengembangan Geopark dan Cagar Biosfer	PU-8	PD-5
Pembangunan Sistem untuk Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	PU-9	PD-7

Kegiatan Prioritas	Program Unggulan (PU)	Prioritas Daerah (PD)
Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif untuk Meningkatkan Daya Tanggap Pemerintahan Terhadap Perubahan dan Kebutuhan Masyarakat	PU-9	PD-7
Pemerintahan Modern (Digital, Inovatif, Kolaboratif dan Efisien)	PU-9	PD-7
Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (Evidence)	PU-9	PD-7
Penyiapan Dukungan Data Terintegrasi	PU-9	PD-7
Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah dan Lokal	PU-10	PD-6
Pembangunan Infrastruktur Energi	PU-10	PD-6
Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	PU-10	PD-6
Pembangunan Infrastruktur Transportasi	PU-10	PD-6
Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	PU-10	PD-6
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Prasarana Lainnya (SPAM, SPAL, Sistem Pengelolaan Limbah B3, Sistem Pengelolaan Persampahan)	PU-10	PD-6
Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar (Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Perumahan dan Permukiman, serta Perkotaan)	PU-10	PD-6
Penataan Ruang Berkelanjutan	PU-10	PD-6

Sumber : RKPD Perubahan NTB Tahun 2025

2.3 Target Pembangunan Daerah Tahun 2025

Dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Target IKU dan IKD pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025 Target
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54 (2023)	0.56
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.53	0.517
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi :			
	- Dengan Tambang	%	5.30	6.00
	- Non Tambang	%	3.87	6,00 - 6,50
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.83	0.84
5	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.5	3.55
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32.28	35.80
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.73	2,19-2,79
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	35,182.00	35,408.24
9	Inklusi Keuangan	%	NA	88.70
10	Tingkat Kemiskinan	%	11.91	11,68-12,18
11	Rasio Gini	Poin	0.364	0,369-0,373
12	Tingkat Inflasi	%	1,28	3-3,7
13	Indeks Desa	(%)	77.08	77.88
14	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.44	78.83
15	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3.87	4.21
16	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	NA	0.39
17	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349,447	382,813
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,37 (2023)	58,64-58,78
19	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113.64	135.41
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.78	76.19
21	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	NA	15.31
22	Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	54.55	61.09
23	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks (Kategori)	77,99 (BB)	78,77 (BB)
24	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63.4	76.50

Sumber : RKPD Perubahan NTB Tahun 2025

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran digunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 4 (empat) aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Tabel 6 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Provinsi NTB
Tahun 2025

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025 Target
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)				
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.44	78.83
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	2.74	1.98
3	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	709	751
4	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	192.23
5	Kapasitas air baku	m3/detik	3.53	3.73
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	21.09	35.83
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6.84	8.00
8	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	20.00
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	45.00	64.00
10	Persentase Penurunan Emisi GRK			
	a. Kumulatif	%	NA	11.53
	b. Tahunan	%	NA	19.83
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113.64	135.41
12	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.56	0.59
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.78	76.19
14	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	%	1.6	1.59
15	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	NA	0.536
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
	- Dengan Tambang	%	5.30	6.00
	- Non Tambang	%	3.87	6,00 - 6,50
2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.83	0.84
3	Tingkat Kemiskinan	%	11.91	11,68-12,18
4	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32.28	35.8
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73 (Per Agustus)	2,19-2,79
6	Rasio Gini	Poin	0.364	0,369-0,373
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,54 (2023)	0.56
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72.25	72.92
9	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	257 (SP 2020)	184
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29.8	21.7
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99.6	99.31
12	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	78.48	80

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025 Target
13	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	29.37	22.84
14	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	NA	36
15	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	60.00	80.00
16	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	NA	20.00
17	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	58.30	60.70
18	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2.37	2.34
19	Insidensi Tuberkulosis			
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	58.96	85.00
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	88.53	95
20	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,87	8,6-8,63
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.98	14,1-14,13
22	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:			
	a) Literasi Membaca	%	NA	10
	b) Numerasi	%	NA	0,00- 10,00
23	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:			
	a) Literasi Membaca	%	NA	26,24-28,74
	b) Numerasi	%	NA	22,68-25,18
24	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9.44	10.02
25	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	84.07	84.68
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68.04	70.34
27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	37.16	28.65
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	71.4	71,68 - 71,7
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,37 (Tahun 2023)	58,64-58,78
30	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	59,99 (Tahun 2023)	61.14
31	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	65.51	66.71
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.53	0.517
33	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91.54	91.77
34	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,67 (Tahun 2023)	53.94

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025 Target
35	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	NA	35
36	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	2	3
37	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	NA	74.63
38	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	50.78	53.32
39	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	29.49	29
III ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3.87	4.21
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1.54	3.2
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.75	2.03
4	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	12,79 (Share PDRB Ekraf terhadap Provinsi (%))	0.39
5	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349,447	382,813
6	Rasio kewirausahaan Daerah	%	0.12	2.37
7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63.4	76.5
8	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3.27	3.5
9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	NA	51.15
10	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	NA	54.53
11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17.43	23.50
12	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,74 (Tahun 2023)	5.7
13	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	7.3
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	31.8	36.9
15	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	35.21	24,53-24,55
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	75,83 (Tahun 2024)	76.21
17	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67.74	71,68-71,7
18	Persentase Desa Mandiri	%	39.57	41.14
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1.87	1.44
20	Tingkat Inflasi	%	1.28	3-3,7
21	Indeks Kota Berkelanjutan	%	NA	60
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	NA	24.62
23	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	NA	0.15
24	Nilai Transaksi Saham per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	Miliar Rupiah	NA	1,099,427.73

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025 Target
25	Total Kredit/PDRB	%	NA	38
26	Inklusi Keuangan	%	NA	88.7
27	Jumlah Kerjasama Provinsi	%		10
28	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	3.01	3.03
29	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	NA	0.19
30	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%	NA	8.95
31	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	NA	2.15
32	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0.95	0.97
33	Return on Asset (ROA) BUMD	%	NA	1.91
34	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	20,258	21,185
35	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	14.97	15.26
36	Indeks Zakat Nasional	Poin	0.56	0.59
37	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	91.47	91.50
IV ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Nilai SAKIP	Nilai	72,88 (BB)	74,01 (BB)
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks (Kategori)	77.99	78,77 (BB)
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77.74	70
4	Indeks Pemerintah Digital	Skor	NA	1.78
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.56	3.50
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.42	4.03
7	Indeks Integritas Nasional	Indeks	NA	71.99
8	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	NA	65
9	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	27.03	70
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	70.22	72
11	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76.37	75,37-78,63
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.5	3.55
13	Indeks Transformasi Digital Nasional	Skor	45,85 (Tahun 2022)	46.55
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks		77.5
15	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	NA	65
16	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	2.826	2.927
17	Opini BPK atas LKD	Opini	WTP	WTP
18	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Nilai	78,4 (2023)	82.92
19	Nilai Sistem Merit	Nilai	264.5	292
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86.03	84.3

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025 Target
INDIKATOR KINERJA KUNCI				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN			
1	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	%	98.65	98.70
2	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	%	92.48	92.50
3	Kemampuan Literasi SMA	%	64.78	65.38
4	Kemampuan Literasi SMK	%	58.58	59.88
5	Kemampuan Literasi SDLB	%	54.18	55.78
6	Kemampuan Literasi SMPLB	%	61.53	62.03
7	Kemampuan Literasi SMALB	%	61.92	62.42
8	Kemampuan Numerasi SMA	%	55.43	57.03
9	Kemampuan Numerasi SMK	%	51.58	53.78
10	Kemampuan Numerasi SDLB	%	50.79	51.39
11	Kemampuan Numerasi SMPLB	%	59.4	59.65
12	Kemampuan Numerasi SMALB	%	59.22	59.72
13	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	41.14	44.1
2	KESEHATAN			
1	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%	100	100
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi	%	40	40.29
2	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	%	62.93	65.53
3	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	15.00	18.00
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman	%	5.56	6.00

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025
				Target
5	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	75.54	76.04
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	5.19	6.00
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	99.61	99.62
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100
3	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	16.67	33.33
4	persentase penanganan pra bencana	%	100	100
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100
6	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100
6	SOSIAL			
1	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	25.00	30.00
7	TENAGA KERJA			
1	Tersedianya RTKD Provinsi yang masih berlaku	%	40	0
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70	75
3	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	50.78	53.32
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	22.57	23.7
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	%	67.47	70.84
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	27.73	29.12

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025 Target
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
9	PANGAN			
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	40.38	52.42
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4.27	4.27
10	PERTANAHAN			
1	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100
2	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	100	100
11	LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	75.78	76.19
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100	100
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	%	74.15	74.89
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100	100
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	50.79	30.00
2	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	11.66	11.76
3	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	100	100
4	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	100	100
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.37	2.34
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	60.20	60.80
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5.90	5.57
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	kelahiran per 1000 perempuan	37.80	32.68

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025 Target
15	PERHUBUNGAN			
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0.82	0.83
2	Kinerja lalu lintas provinsi	Km/Jam	NA	30
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	NA	2.22
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	0
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	0	7.89
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	81.71	81.75
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	NA	5.05
2	Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	36.83	37.75
3	Proporsi Usaha Kecil Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	63.03	63.03
4	Pertumbuhan Wirausaha	%	4.49	4.49
18	PENANAMAN MODAL			
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	36.75	12.00
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	Indeks	53,67 (Tahun 2023)	53.94
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	0.06	0.07
20	STATISTIK			
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Skor	2.77	2.77
21	PERSANDIAN			
1	Indeks Keamanan Informasi	Skor	437	456
22	KEBUDAYAAN			
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100
2	Persentase kenaikan Jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	%	52	54
23	PERPUSTAKAAN			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	60.42	61.00
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65.67	65.92
24	KEARSIPAN			
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70.08	70.5
25	URUSAN PILIHAN			
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	248,580.72	251,066.00

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025 Target
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	968,165.67	980,889.00
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	100	100
26	PARIWISATA			
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1.75	2.03
2	Persentase pertumbuhan Kunjungan wisatawan	%	4.51	4.74
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0.39	0.39
4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	50.00
27	PERTANIAN			
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-5.86	0.56
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-13.92	1.00
3	Peningkatan Produksi Perkebunan	%	1.06	0.22
4	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	1.00	2.00
5	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	80.99	81.79
6	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	69.4	70.09
7	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	100	100
28	KEHUTANAN			
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	9.72	11.37
2	Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	%	6.73	7.03
3	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	100	100
4	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0.27	0.24
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100
30	PERDAGANGAN			
1	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	77.75	88
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi	%	100	100

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025
				Target
3	Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	%	24.94	29.20
31	PERINDUSTRIAN			
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	%	4.19	4.21
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi	%	3.87	3.89
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Orang	419926	341,328
4	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	US\$ Miliar	0.024	2.17
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Rp. Triliun	24.8	8.68
6	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	18.51	18.75
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
32	TRANSMIGRASI			
1	Persentase Desa Maju dan Mandiri di 4 Kawasan Transmigrasi	%	76.27	81.36
2	Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat di 4 Kawasan transmigrasi	%	NA	1.10
	FUNGSI PENUNJANG DAN PENGAWASAN			
33	SEKRETARIAT DPRD			
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%	NA	100
34	PERENCANAAN			
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100
2	Kesesuaian antara RKPD dengan APBD	%	100	100
35	KEUANGAN			
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	29.73	33.29
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	49.75	58.88
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	88.96	90.00
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	-1.62	3.00
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		21.7	35.11
6	Persentase Penurunan SILPA	%	38.15	31.00

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025 Target
36	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	66.28	67.94
2	Persentase Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Implementasi <i>Corporate University (CORPU)</i>	%	NA	50.00
37	KESBANGPOLDAGRI			
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	%	70.00	71.60
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	71.00	76.00
38	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	NA	50
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0.95	0.96
39	PENGAWASAN			
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level III -3.116	Integrated Level III 2.67
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level III -3.06	Terdefinisi (Level III) (3,00) 3.07
3	Manajemen Risiko Indeks	indeks	3.213	3.219
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	84	89.89
40	PENGADAAN			
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	%	19.71	19.91
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		22.65	22.88
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	9/9	9/9
41	PELAYANAN PUBLIK			
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Skor	85.03	85.12
2	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.03	84.30

Sumber : RKPD Perubahan NTB Tahun 2025

BAB III

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

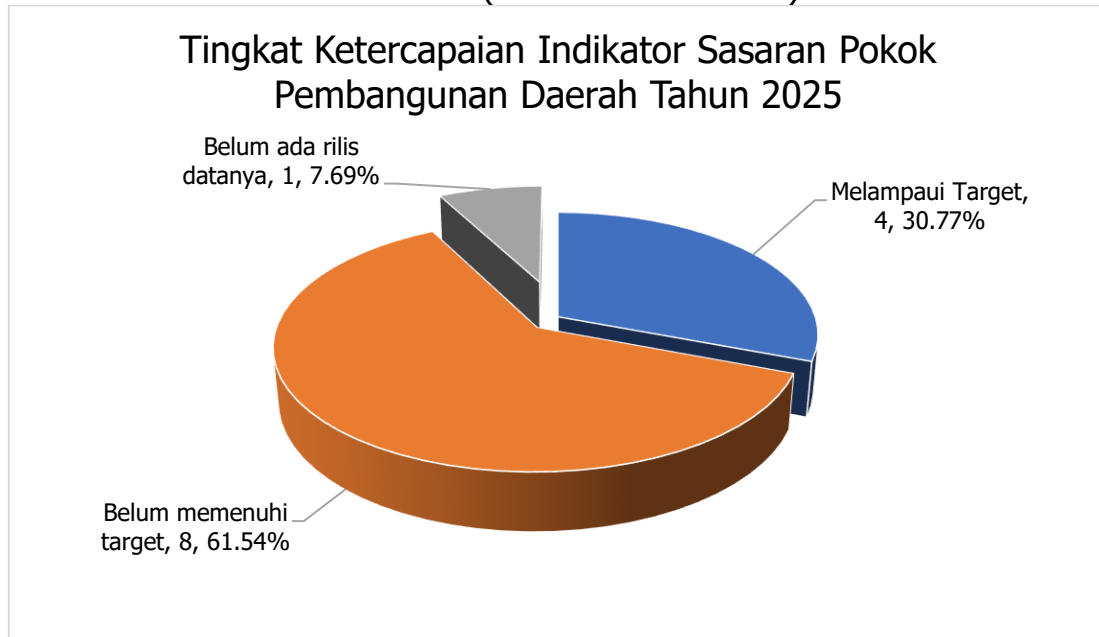
3.1 Capaian Indikator Makro Daerah Berdasarkan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi RPJPD Provinsi NTB 2025-2045 dan RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 dengan sasaran dan target kinerja tahun 2025 yang harus dicapai. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, terdapat 5 (lima) sasaran pokok pembangunan provinsi NTB tahun 2025 dengan 13 indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara daerah maju;
2. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
3. Kemiskinan menurun menuju kemiskinan ekstrim nol dan ketimpangan menurun
4. Intensitas bencana lingkungan dan emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emmission (NZE);
5. Kepemimpinan pemerintahan daerah semakin efektif meningkatkan inovasi dan daya saing daerah.

Capaian target sasaran pokok pembangunan secara umum berada pada rata-rata 93,28 persen. Capain indikator tertinggi terjadi pada indikator Kontribusi PDB Industri Pengolahan yang mencapai 158,91 persen (target sebesar 4,21 persen dan realisasi sebesar 6,69 persen). Sedangkan yang terendah adalah Penurunan Intensitas Emisi GRK yang mencapai 28,74 persen (target 15,31 persen dan realisasi 4,40 persen). Sementara itu, berdasarkan keterangan capaian realisasi menunjukkan bahwa 54 persen capaian indikator belum memenuhi target, 31 persen melampaui target, 8 persen sesuai target, dan 7 persen data belum tersedia.

Gambar 4 Tingkat Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Daerah NTB Tahun 2025 (Jumlah Indikator: 13)



Sumber : data diolah, 2026

Beberapa indikator kinerja sasaran pokok pembangunan daerah tahun 2025 yang memenuhi bahkan melampaui target yaitu Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Kontribusi PDB Industri Pengolahan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun indikator yang belum memenuhi target yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Penurunan Intensitas Emisi GRK, PDRB Per Kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi PDRB Provinsi, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Ekonomi Biru Indonesia, dan Indeks Daya Saing Daerah. Sedangkan indikator Indeks Modal Manusia (IMM) belum ada rilis datanya dari Lembaga terkait

Adapun rincian capaian dari indikator sasaran pembangunan daerah NTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Capaian Sasaran Pembangunan Daerah NTB Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025			Keterangan Capaian
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.30	6.00	3.22	53.67	Belum memenuhi target
2	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	32.28	35.80	33.67	94.05	Belum memenuhi target
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.83	0.84	0.82	97.62	Belum memenuhi target
4	Tingkat Kemiskinan	%	11.91	11,68-12,18	11.38	102.57	Melampaui Target

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025			Keterangan Capaian
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
5	Rasio Gini	Poin	0.364	0,369-0,373	0.364	101.36	Melampaui Target
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54 (2023)	0.56	NA	NA	Belum ada rilis data
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	15.31	13.80	90.14	Belum memenuhi target
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.78	76.19	77.40	101.59	Melampaui Target
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.73	2,19-2,79	3.05	90.68	Belum memenuhi target
10	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	3.87	4.21	6.69	158.91	Melampaui Target
11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63.40	76.50	73.25	95.75	Belum memenuhi target
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.50	3.55	3.53	99.44	Belum memenuhi target
13	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	NA	54.53	50.73	93.03	Belum memenuhi target

Sumber : data diolah, 2026

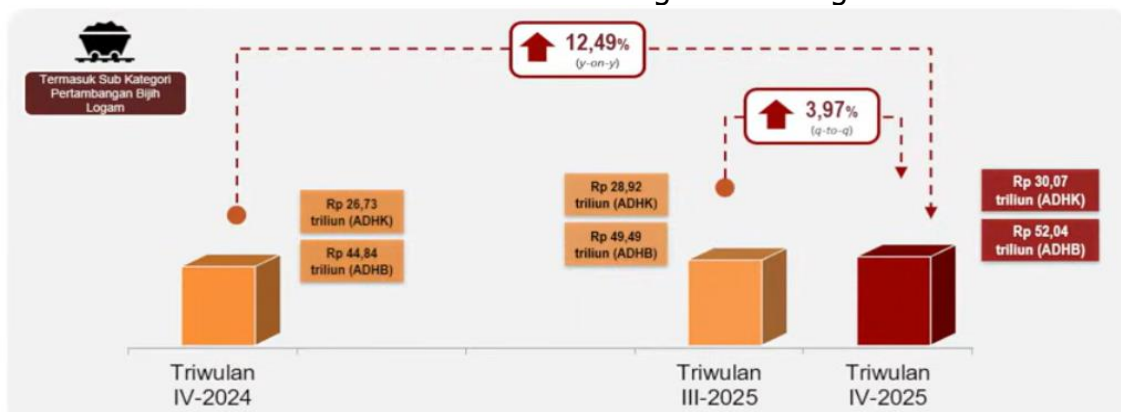
Keterangan:

NA = Data belum tersedia/rilis

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi NTB dengan tambang, secara *c to c* (*cumulative to cumulative*), ekonomi NTB tumbuh sebesar 3,22 persen dari tahun 2024 ke 2025. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 6 persen. Selanjutnya secara *years on years* (*y on y*) pada triwulan IV 2024 menunjukkan tanda pemulihan di triwulan IV tahun 2025 dengan lonjakan 12,49 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara *q to q* (*quarter to quarter*), kinerja ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 3,97 persen dari triwulan III ke triwulan IV tahun 2025.

Gambar 5 Pertumbuhan Ekonomi NTB Dengan Tambang Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026

Faktor terbesar yang menyebabkan perlambatan tersebut adalah kontraksi tajam pada sektor pertambangan dan penggalian yang mencatat penurunan hingga kontraksi 20,05 persen sepanjang tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh dua hal utama yaitu drastisnya penurunan produksi tambang serta kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga oleh pemerintah pusat dalam rangka mendukung agenda hilirisasi mineral nasional. Pada beberapa triwulan awal tahun, produksi tambang bahkan anjlok hingga 50 persen, dipengaruhi oleh pembatasan ekspor serta kendala operasional smelter yang belum berfungsi optimal.

Selama ini, sektor pertambangan merupakan salah satu pendorong utama roda perekonomian NTB, berkontribusi besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dengan posisinya sebagai penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertanian. Nilai kontribusinya mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Tambang tembaga, khususnya yang dikelola oleh perusahaan besar di wilayah Sumbawa, tidak hanya menjadi penggerak utama lewat produksi dan ekspor tetapi juga memberikan dampak ganda yang luas. Dampak tersebut meliputi penyerapan tenaga kerja yang signifikan, peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar area tambang hingga penguatan berbagai sektor penunjang seperti transportasi, perdagangan, akomodasi dan jasa keuangan.

Ketika sektor tambang mengalami gangguan, efeknya langsung terasa di berbagai aspek ekonomi daerah. Penurunan produksi dan ekspor yang terjadi menyebabkan dampak signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD), aktivitas logistik di pelabuhan menurun serta konsumsi dan investasi di wilayah penyangga tambang melemah. Bahkan, pada triwulan pertama dan kedua tahun 2025, ekonomi NTB sempat masuk ke fase kontraksi sebelum mulai membaik secara bertahap di semester kedua, berkat kebijakan pengembalian izin ekspor konsentrat dan penguatan sektor domestik yang ada.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang justru mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi tanpa tambang secara *y on y* mencapai 13,70 persen sedangkan secara *q to q* sebesar 0,70 persen. Kemudian secara *c to c* mencapai 8,33 persen, melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 6,00 – 6,50 persen.

Gambar 6 Pertumbuhan Ekonomi NTB Dengan Tambang Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026

Sumber pertumbuhan menurut lapangan usaha berasal dari Industri Pengolahan (76,37%) diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi (9,02%) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,42%).

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Menurut Jenis Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ADHK 2010			Distribusi ADHB		
	2023	2024*	2025**	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,05	1,54	5,03	22,23	21,45	21,89
B. Pertambangan dan Penggalian	-10,39	11,66	-20,05	17,93	20,12	16,51
C. Industri Pengolahan	2,51	4,19	76,37	3,86	3,87	6,69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,04	9,08	5,44	0,08	0,08	0,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,85	0,77	3,91	0,08	0,07	0,07
F. Konstruksi	10,87	2,93	3,32	9,62	9,11	9,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,94	5,87	6,15	14,46	14,20	14,53
H. Transportasi dan Pergudangan	8,14	4,21	3,45	5,89	5,83	5,83
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,97	8,37	7,42	1,73	1,75	1,81
J. Informasi dan Komunikasi	4,88	4,34	3,02	2,09	2,00	1,95
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,20	5,72	9,02	3,92	3,83	4,04
L. Real Estat	4,40	4,02	3,73	3,01	2,89	2,86
M, N. Jasa Perusahaan	7,40	5,24	4,02	0,18	0,18	0,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,55	6,56	3,59	5,89	5,82	5,77
P. Jasa Pendidikan	5,12	3,46	2,10	4,91	4,77	4,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,03	6,19	2,38	1,97	1,93	1,91
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,50	4,81	4,55	2,13	2,10	2,16
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,80	5,30	3,22	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi bila dilihat dari pendekatan pengeluaran, diketahui bahwa penyumbang terbesar dari pertumbuhan berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (4,49%) diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mencapai 2,99 persen.

Tabel 9 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Komponen	Triw III- 2025 terhadap Triw II- 2025 (Q-to-Q)**	Triw IV- 2025 terhadap Triw III- 2025 (Q-to-Q)**	Triw III-2025 terhadap Triw III- 2024 (Y-on-Y)**	Triw IV- 2025 terhadap Triw IV- 2024 (Y-on-Y)**	Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 (C-to-C)***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,28	2,31	4,51	5,18	4,49
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,84	-2,78	1,12	0,38	0,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,11	11,16	5,89	3,05	2,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,29	0,77	3,31	2,37	1,89
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	24,97	64,09	-26,49	103,11	-10,82
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	14,10	30,44	-18,89	27,34	-11,66
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,91	3,97	2,82	12,49	3,22

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026

Capaian kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif didorong oleh berbagai intervensi yang sifatnya bersifat fasilitatif dan koordinatif diantaranya:

- koordinasi intensif dengan PT AMNT dan Kementerian ESDM Pusat untuk memperoleh izin relaksasi ekspor konsentrat tembaga;
- Memfasilitasi operasional smelter yang berfokus pada hilirisasi tambang sekaligus diversifikasi ke pengolahan pangan/UMKM;
- Mendukung resiliensi sektor primer melalui program peningkatan produksi padi. Intervensi berupa optimalisasi lahan dan bantuan benih/irigasi, sehingga sektor ini menjadi penyangga saat tambang fluktuatif;
- Revitalisasi BUMD untuk mendukung jasa keuangan dan perdagangandengan memprioritaskan BUMD sebagai katalisator nilai tambah produksi lokal;
- Memfasilitasi realisasi investasi Rp61,1 triliun sepanjang 2025 (melampaui target nasional). Fokus pada investasi smelter dan pendukungnya serta konstruksi dan pariwisata yang berdampak langsung pada PMTB dan ekspor;

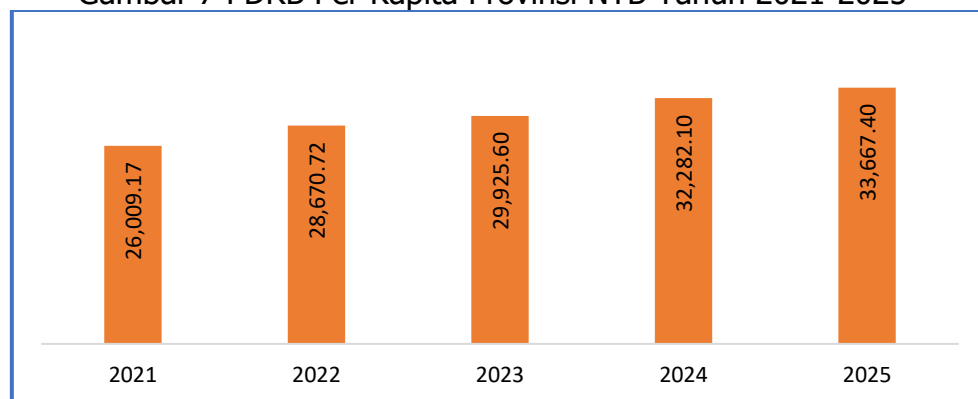
- f. Mendorong aktivitas perdagangan besar-eceran domestik melalui stabilisasi harga dan promosi produk lokal, mendukung konsumsi rumah tangga yang selalu tumbuh positif;
- g. Program perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat (melalui BUMD dan bansos tepat sasaran) menjaga konsumsi rumah tangga agar tidak tergerus fluktuasi tambang.

3.1.2 PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah indikator ekonomi yang dihitung dengan membagi total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dengan jumlah penduduknya pada periode tertentu. Ini menggambarkan rata-rata pendapatan atau nilai tambah yang dihasilkan per orang. Pada tahun 2025, nilai PDRB Per Kapita Provinsi NTB telah mencapai sebesar Rp.33,28 juta atau meningkat 4,30% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp.32,28 juta, ini artinya rata-rata pendapatan atau nilai tambah yang dihasilkan setiap orang di NTB telah mencapai Rp.33,280 juta. Capaian PDRB per kapita NTB Rp33,67 juta pada 2025 adalah kemajuan nyata meskipun pertumbuhan tahunan secara keseluruhan moderat (3,22%).

Meskipun ada peningkatan tetapi belum memenuhi target nasional yang diharapkan PDRB Per Kapita penduduk NTB pada tahun 2025 sebesar Rp.35,80 juta. Hal ini dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi PDRB per Kapita.

Gambar 7 PDRB Per Kapita Provinsi NTB Tahun 2021-2025



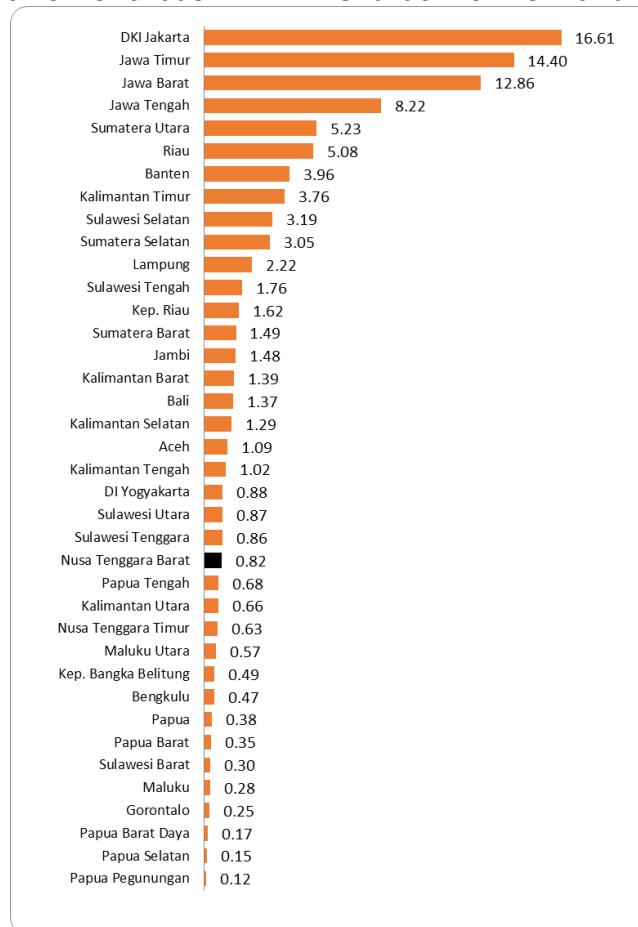
Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

3.1.3 Kontribusi PDRB Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi NTB pada tahun 2025 mencatatkan capaian penting meskipun pertumbuhan ekonomi secara kumulatif belum signifikan. Kontribusi NTB terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tetap relatif kecil, mencerminkan posisi provinsi ini sebagai salah satu penyumbang di bawah rata-rata nasional tetapi dengan potensi akselerasi yang tinggi berkat hilirisasi tambang.

Sampai dengan tahun 2025, kontribusi PDRB NTB terhadap PDB nasional tahun 2025 sebesar 0,82 persen masih tergolong kecil. Angka ini menempatkan NTB di kelompok provinsi dengan kontribusi kecil (peringkat bawah secara nasional), jauh di bawah provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur atau DKI Jakarta yang masing-masing berkontribusi di atas 10–20 persen. Secara regional, Bali dan Nusa Tenggara, NTB masih kalah jauh dari provinsi tetangga seperti Bali yang mencapai 1,37 persen namun lebih tinggi dari NTT yang sebesar 0,63 persen.

Gambar 8 Kontribusi PDRB Menurut Provinsi Tahun 2025



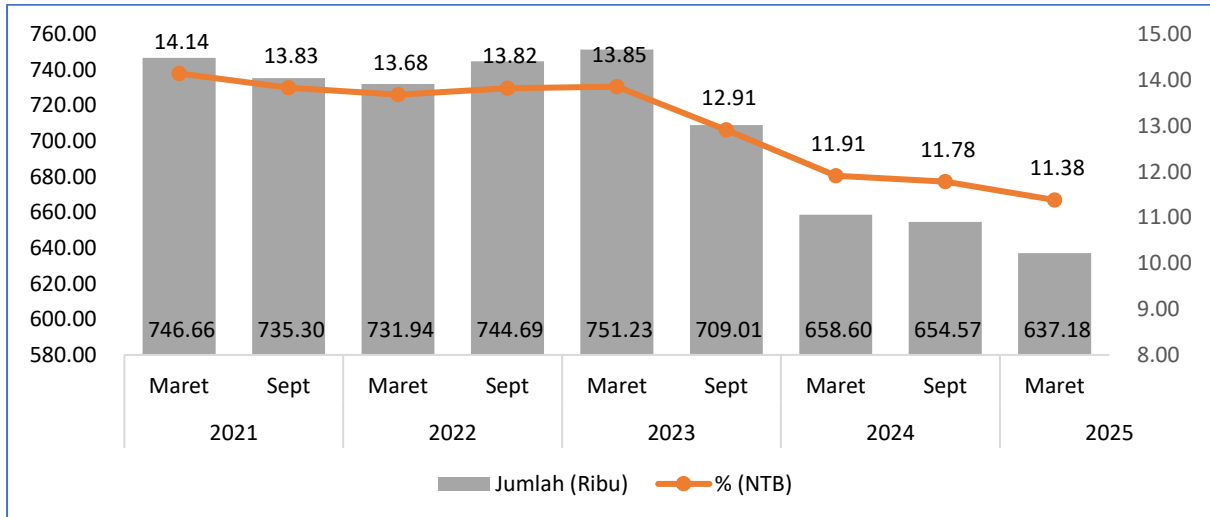
Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

3.1.4 Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada September 2025 sebesar 11,38 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 637.180 jiwa, menurun 0,40 persen poin atau 17.390 jiwa terhadap Maret 2025 yang mencapai 11,78 persen (654.570 jiwa) dan menurun 0,53 persen poin atau 21.420 jiwa terhadap September 2024 yang mencapai 11,91 persen. Penurunan persentase kemiskinan pada tahun 2025 sangat signifikan bila dibandingkan penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata berkisar 0,1-0,2 persen. Penurunan persentase kemiskinan juga melampaui target nasional yang ditetapkan untuk provinsi NTB pada tahun 2025 berkisar pada angka 11,68-12,18%.

Pencapaian ini didukung oleh berbagai intervensi dari pemerintah diantaranya dengan pendekatan 3 (tiga) strategi utama yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui program bantuan sosial berupa bantuan jaminan kesehatan nasional dan daerah dalam bentuk (PBI JK), Bantuan peralatan sekolah dan beasiswa bagi siswa miskin melalui program Indonesia pintar, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai, pemasangan listrik murah, peningkatan kualitas rumah layak huni, serta bantuan sembako. Untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin, dilakukan dalam bentuk bantuan benih, ternak dan hijauan pakan ternak, pelatihan olahan pakan ternak, pelatihan keterampilan dan bantuan alat, pengembangan ekonomi sirkuler, serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan lainnya yang merupakan kolaboratif yang bersumber dari dana APBN, APBD Kabupaten/Kota se NTB serta mitra pembangunan di provinsi NTB, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, peningkatan konektivitas antar wilayah, peningkatan sarana dan prasarana irigasi, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur dasar lainnya.

Gambar 9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin NTB Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

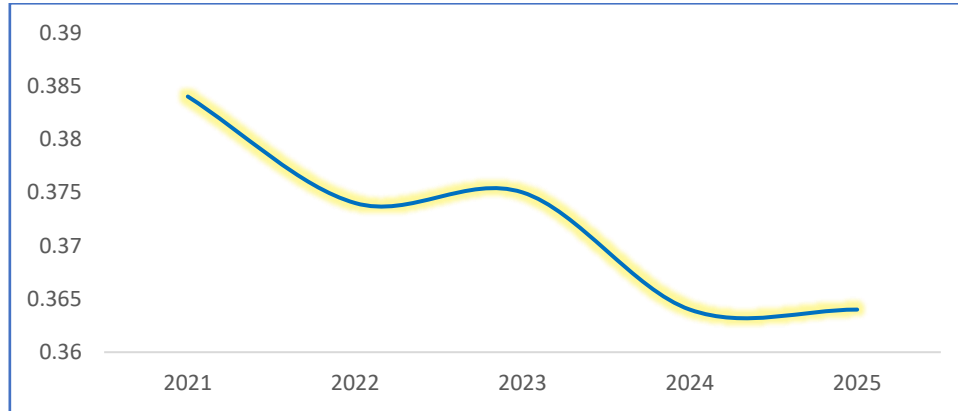
3.1.5 Rasio Gini

Rasio Gini (*Gini Ratio*) adalah indikator tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan penduduk suatu wilayah, bernilai antara 0 hingga 1. Mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata (setara), sementara mendekati 1 berarti ketimpangan tinggi. Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh *gini ratio* adalah sebesar 0,364. Angka ini menurun 0,005 poin jika dibandingkan dengan *gini ratio* Maret 2025 yang sebesar 0,369 dan sama jika dibandingkan dengan *gini ratio* September 2024 yang sebesar 0,364. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *gini ratio* di daerah perkotaan pada September 2025 adalah sebesar 0,386 turun dari Maret 2025 yang sebesar 0,397. Sebaliknya, *gini ratio* di daerah perdesaan pada September 2025 adalah sebesar 0,328, lebih tinggi dari Maret 2025 yang sebesar 0,323. Jika dilihat secara keseluruhan, sepanjang periode September 2018 sampai September 2025, *gini ratio* di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan.

Menurut ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di provinsi NTB adalah sebesar 19,23 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk provinsi NTB pada September 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 18,50 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar

20,51 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah.

Gambar 10 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Provinsi NTB



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

Capaian angka ketimpangan pendapatan (rasio gini) di provinsi NTB sebesar 0,364 poin pada tahun 2025 termasuk kategori ketimpangan rendah dan melampaui target nasional yang ditetapkan untuk provinsi NTB sebesar 0,369-0,373 poin.

3.1.6 Indeks Modal Manusia (IMM)/ Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Modal Manusia atau *Human Capital Index* (HCI) adalah indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia untuk mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas generasi pekerja mendatang. HCI menilai potensi ekonomi dengan melihat probabilitas hidup, kualitas pendidikan dan kesehatan (termasuk *stunting*) di suatu negara. Di Indonesia, penggunaan indikator Indeks Modal Manusia sebagai ukuran keberhasilan pembangunan manusia terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan mulai diterapkan tahun 2025 ini sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-20245 dan RPJPD Provinsi NTB 2025-2045 serta RPJMD Provinsi NTB 2025-2029.

Indeks Modal Manusia diukur melalui beberapa komponen utama: 1. Probabilitas bertahan hidup (*survival*) hingga usia 5 tahun: Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita. 2. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah.

Kualitas pendidikan diukur melalui *harmonized test scores*. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran *Learning-Adjusted Years of Schooling* menggunakan metrik konversi. 3. Kesehatan: Mencakup berbagai indikator kesehatan termasuk stunting yang merupakan kondisi dimana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah (1) *adult survival rate* yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi stunting. Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap.

Pada tahun 2025, Indeks Modal Manusia Provinsi NTB ditargetkan meningkat menjadi 0,56 poin yang berarti anak yang lahir di NTB saat ini diperkirakan hanya akan mencapai 56 persen dari produktivitas penuhnya saat dewasa. Meskipun belum ada rilis capaian tahun 2025, Indeks Modal Manusia Provinsi NTB telah mencapai 0,54 tahun 2023, akan terus meningkat seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM NTB pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,19 persen atau 0,87 poin sehingga menjadi 73,97 poin jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 73,10 poin dengan kategori Tinggi. Peningkatan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dua indikator mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 4,32 persen dibanding tahun sebelumnya dan pengeluaran riil per kapita sebesar 2,72 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya mencapai 0,48 persen. Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya mencapai 0,07 persen.

Tabel 10 Perkembangan IPM Provinsi NTB 2021-2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	Tahun	71,33	71,66	72,02	72,25	72,60
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,90	13,96	13,97	13,98	13,99

Dimensi/Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,38	7,61	7,74	7,87	8,21
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp.000	10.377	10.681	11.095	11.606	11.922
IPM		70,86	71,65	72,73	73,10	73,97

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

3.1.7 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah ukuran jumlah emisi karbon yang dihasilkan per satuan aktivitas tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi karbon dan keberlanjutan ekonomi, di mana penurunan intensitas mengindikasikan upaya dekarbonisasi. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan intensitas emisi GRK yang signifikan melalui kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK), dengan target kumulatif penurunan emisi GRK mencapai 30,1% pada 2029, sedangkan pemerintah provinsi NTB target kumulatif penurunan emisi GRK mencapai 15,09% dan target tahunan sebesar 26,48% pada 2029.

Pada tahun 2025 Provinsi NTB menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 15,31 persen berdasarkan hasil perhitungan sementara, Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil menurunkan intensitas emisi GRK sebesar 13,80 persen dan persentase penurunan emisi GRK tahunan sebesar 4,891 persen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11 Penurunan Emisi GRK Tahunan Tahun 2025 Menurut Sub Sektor

Tahun	Subsektor	Baseline Tahunan	Penurunan Emisi Tahunan (ton CO2 eq)	% Penurunan Emisi GRK tahunan	Andil Penurunan Emisi per subsektor (%)
2025*		17.926.377,90	876.805,64	4,891	4,891
	Persampahan		644.785,26		3,597
	Pertanian		223.006,40		1,244
	Kehutanan		6.447,50		0,036
	Air Limbah		1.347,32		0,008
	Energi		762,68		0,004
	Blue Carbon		431,12		0,002
	Transportasi		25,35		0,000

Sumber:

- Baseline Tahunan sesuai dengan Hasil Pemodelan Dinamika Sistem.
- Penurunan Emisi Tahunan sesuai dengan Aplikasi Aksara dengan status disetujui/difinalkan.

Catatan: *Angka sementara

Angka ini berpotensi terus naik mengingat beberapa terobosan telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kerjasama Pembangunan Rendah Karbon dengan *Low Carbon Development Initiative* - Bappenas yang ditandatangani Tahun 2023 dan mitra pembangunan lainnya dalam usaha penurunan emisi gas rumah kaca. Selain itu rencana aksi pembangunan rendah karbon sudah diselaraskan dalam RPJMD 2025 – 2029 dan Renstra OPD sesuai sektor. Hal ini menjadi faktor kunci penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca.

3.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang mengukur kualitas lingkungan suatu wilayah, menggabungkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKTL). Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Air (IKA) provinsi NTB telah mencapai sebesar 71,24 poin, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 81,14 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) telah mencapai 81,41 poin dan Indeks Kualitas Lahan (IKTL) mencapai 77,36 poin sehingga membentuk nilai komposit Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi NTB sebesar 77,40 poin.

Capaian Nilai IKLH Provinsi NTB sebesar 77,40 poin pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,14 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 75,78 poin. Capaian tahun 2025 ini bahkan melampaui target nasional untuk NTB sebesar 76,19 poin.

Keberhasilan provinsi NTB untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup oleh beberapa terobosan diantaranya:

- a. Pembinaan dan penguatan kapasitas kelompok Program Kampung Iklim (Proklim). Pembinaan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas pelaporan kegiatan serta memperkuat peran masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal;
- b. Pendampingan sekolah adiwiyata. Sekolah Adiwiyata berperan aktif dalam pengendalian pencemaran air melalui penerapan program-program konservasi dan pengelolaan limbah cair berbasis partisipatif. Tujuan utamanya adalah mengurangi pemborosan air, mencegah pencemaran sumber air (tanah dan

- sungai) serta meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk menghemat dan menjaga kebersihan air;
- c. Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi PROPER. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat pengendalian kualitas lingkungan khususnya terhadap kualitas air serta penegakan hukum lingkungan;
 - d. Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (*Eco Office*);
 - e. Pengendalian pencemaran udara melalui KLHS dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) pemerintah;
 - f. Fasilitasi perizinan lingkungan sebagai upaya ini dilakukan sebagai instrumen preventif yang krusial untuk memastikan setiap aktivitas usaha/kegiatan di pesisir dan laut mematuhi standar lingkungan hidup. Perizinan ini mewajibkan pelaku usaha untuk mengelola limbah dan dampak sebelum operasional dimulai;
 - g. Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan lingkungan;
 - h. Patroli pencegahan dan pengamanan hutan;
 - i. Monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu;
 - j. Rehabilitasi hutan dan lahan.

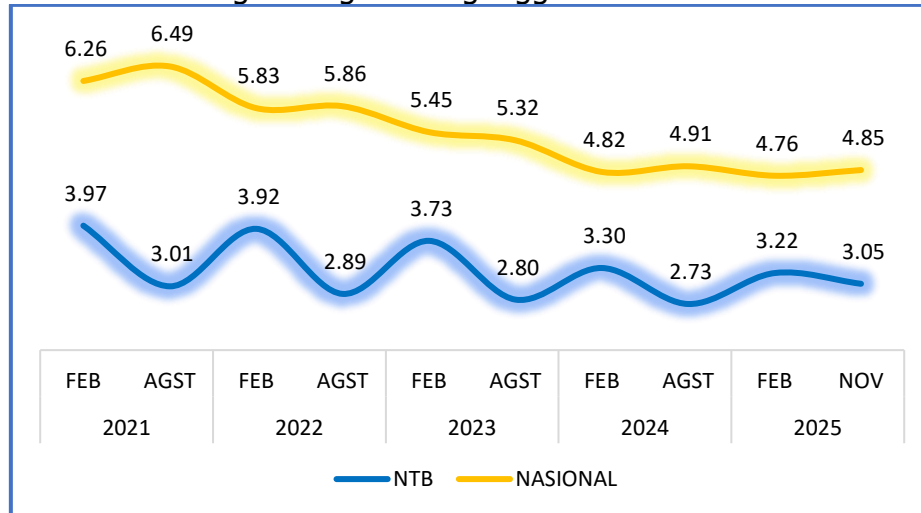
3.1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang benar-benar tidak bekerja, sedang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan rilis BPS Provinsi NTB dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025, jumlah penduduk usia kerja di provinsi NTB sebanyak 4.229.010 jiwa atau 73,78 persen dari total penduduk NTB sebanyak 5.731.107 jiwa. Dari jumlah tersebut, termasuk angkatan kerja sebanyak 3.235,02 jiwa sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 993.990 jiwa.

Jumlah penduduk yang bekerja di NTB mencapai 3.136.300 jiwa atau 74,23 persen dari total penduduk usia kerja dan atau 54,72 persen dari total penduduk NTB. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran sebanyak 98.720 jiwa atau 3,05 persen dari total Angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

di NTB mengalami peningkatan pada November tahun 2025 dengan kenaikan sebesar 0,32 persen jika dibandingkan dengan keadaan bulan Agustus 2024.

Gambar 11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

Adanya kenaikan TPT dipicu ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Meningkatnya lulusan SMP, SMK dan Perguruan Tinggi yang mencari pekerjaan. Disisi lain daya tampung lapangan usaha terbatas. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi pengangguran di NTB diantaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas, melaksanakan Job Fair/Bursa Kerja, pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan serta Pelatihan keterampilan dan bantuan alat untuk wirausaha.

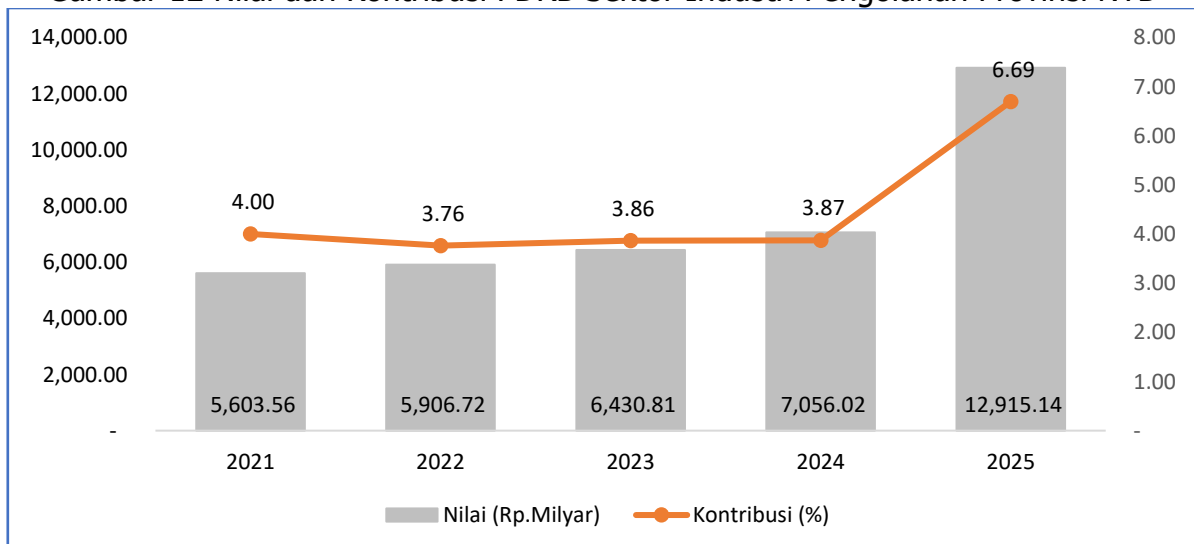
3.1.10 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan (manufaktur) adalah sektor ekonomi yang mengubah bahan mentah/baku menjadi barang setengah jadi atau jadi melalui proses fisik, kimia atau biologis. Industri ini meningkatkan nilai tambah produk, mencakup berbagai sektor seperti makanan, minuman, kimia dan tekstil serta merupakan kontributor utama PDB. Sektor Industri Pengolahan menjadi salah satu pilihan dalam transformasi ekonomi sesuai dengan RPJPN 2025-2045, RPJMD Provinsi NTB 2025-2045 dan

RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 melalui pembangunan ekosistem industri komoditas unggulan daerah diarahkan untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa terutama dalam upaya mengembangkan diversifikasi ekonomi untuk mengoptimalkan pengembangan potensi agromaritim. Prioritas lokasi untuk pengembangan ekosistem ini dilaksanakan pada kawasan pertumbuhan, kawasan komunitas unggulan (kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan sentra garam, kawasan perikanan dan sentra rumput laut, kawasan akua kultur, kawasan perkembangan sentra berbasis perikanan tangkap, kawasan transmigrasi serta kawasan strategis provinsi.

Pada tahun 2025, sudah mulai terlihat pergeseran struktur perekonomian Provinsi NTB dimana kontribusi sektor industri pengolahan berkisar antara 3-4 persen namun sekarang telah meningkat menjadi 6,69 persen, dari Rp.4.839,21 miliar menjadi Rp.8.534,85 miliar, jauh melampaui target nasional untuk NTB sebesar 4,21 persen. Salah satu sub sektor yang menonjol adalah sub sektor industri logam dengan nilai PDRB sebesar Rp.9,39 miliar tahun 2024 menjadi Rp.3.485,38 Miliar. Hal ini sejalan dengan penetapan NTB sebagai salah satu Kawasan Industri Prioritas Nasional dengan titik berat pada pembangunan kawasan smelter yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat. Berikut tren perkembangan kontribusi industri pengolahan di NTB dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 12 Nilai dan Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi NTB



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

Selain mengandalkan industri smelter, pemerintah provinsi saat ini sedang mengembangkan industri agro maritim dengan melakukan hilirisasi komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah tersebar pada enam sektor utama yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan serta kehutanan.

Terdapat beberapa komoditas unggulan daerah yang menjadi perhatian antara lain padi, jagung, kedelai dan singkong. Sementara sektor hortikultura meliputi cabai, bawang merah, tomat, pisang dan nangka. Untuk sektor perkebunan, komoditas unggulan yang didorong hilirisasinya antara lain kopi, tembakau, tebu, vanili, kakao, kelapa, cengkeh, aren dan porang. Di sektor perikanan dan kelautan, NTB menargetkan pengembangan ikan jenis pelagis dan demersal seperti tuna, cakalang, kakap, kerapu, rajungan, udang vaname, lobster, rumput laut hingga teripang.

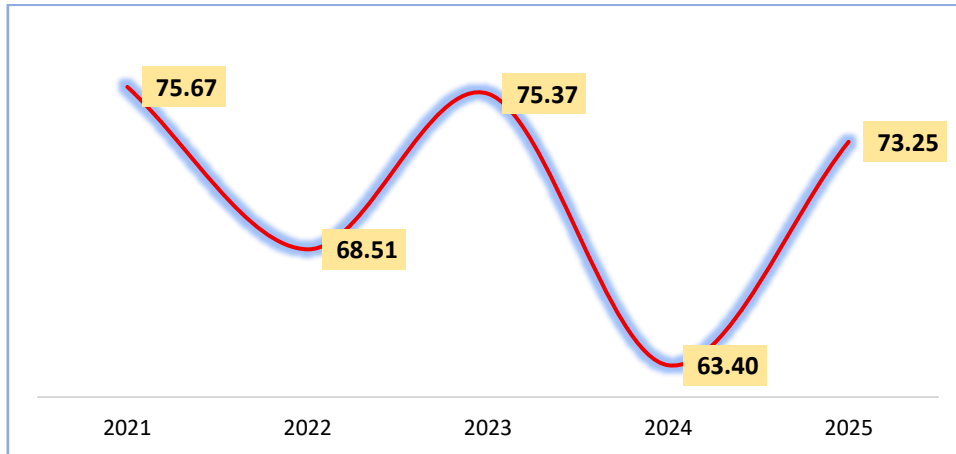
Sektor peternakan mencakup sapi, ayam, telur, kambing, serta produk turunan seperti kerupuk kulit dan sarang walet. Sedangkan sektor kehutanan diarahkan pada pengembangan komoditas kemiri, madu, rotan, jahe serta hasil hutan bukan kayu dan kerajinan ketak.

3.1. 11 Indeks Inovasi Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah menjelaskan bahwa indeks inovasi daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu yang mencakup pembaharuan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan yang dilaporkan pemerintah daerah, dengan kategori: Sangat Inovatif (65,01-100), Inovatif (40,01-65), dan Kurang Inovatif (0,01-40).

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 Tentang Indeks Inovasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025 menetapkan Provinsi NTB sebagai salah satu Provinsi dari 8 provinsi se Indonesia yang masuk kategori Provinsi Sangat Inovatif dengan indeks sebesar 73,25 poin. Dengan demikian Provinsi NTB mampu mempertahankan secara terus menerus untuk masuk kategori Provinsi Sangat Inovatif dari sejak dimulainya penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 hingga sekarang.

Gambar 13 Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTB



Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, 2026 (data diolah)

Berbagai terobosan telah dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB untuk mempertahankan masuk kategori Provinsi Sangat Inovatif diantaranya Komitmen Kepala Daerah merupakan hal paling penting dalam mendorong ekosistem inovasi daerah, menjangking potensi terdapatnya inovasi seperti inovasi destinasi wisata, inovasi SMK, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi ASN personal bahkan inovasi masyarakat pada umumnya. Penting dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara masif terhadap terik dalam menciptakan inovasi dan terakhir penting dilaksanakan lomba inovasi dimana strategi ini memicu dan mengembangkan target serta menjangking seberapa besarnya inovasi yang ada di Provinsi NTB, dan terakhir penting pemberian REWARD terhadap inovator Inovasi dan pelapor inovasi yang telah berkontribusi terhadap Provinsi NTB.

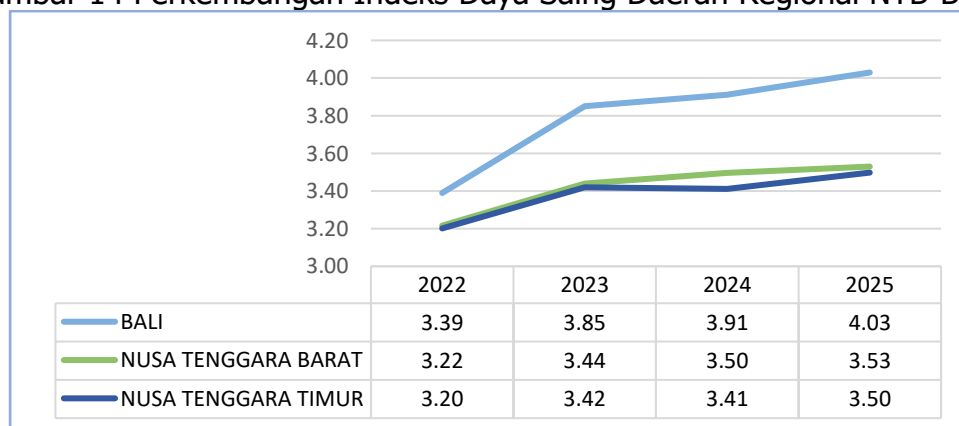
3.1.12 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen pengukuran komprehensif untuk menilai produktivitas, kemandirian dan kemampuan suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan melalui berbagai pilar, seperti SDM, kelembagaan, infrastruktur dan inovasi. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berfungsi sebagai potret objektif untuk melihat kemajuan dan area yang perlu diperbaiki dalam tata kelola pemerintahan dan ekonomi.

NTB menunjukkan performa yang stabil dan positif selama empat tahun terakhir. Nilai IDSD NTB naik secara konsisten dari 3,22 (2022) menjadi 3,53 (2025), atau meningkat 0,31 poin (+9,6 persen). Meskipun pertumbuhannya moderat, NTB berhasil keluar dari posisi di bawah rata-rata dan mendekati kelompok menengah atas secara nasional. NTB berhasil “mengejar” dan bahkan sedikit melebihi rata-rata nasional mulai 2024.

Ini menandakan bahwa pembangunan daya saing di NTB berjalan lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi di Indonesia terutama setelah 2023. Konsistensi peningkatan setiap tahun dan kemampuan mengalahkan rata-rata nasional di dua tahun terakhir. NTB berhasil memanfaatkan potensi pariwisata (Mandalika), pertanian, dan pertambangan dengan baik. NTB masih kalah jauh dari Bali (selisih 0,50 poin pada 2025) dan sedikit di bawah NTT. Daya saing regional Bali-Nusra sangat didominasi oleh Bali, sehingga NTB dan NTT tampak “tertarik” ke bawah oleh rata-rata regional. Jika tren ini berlanjut, NTB berpotensi menjadi penyumbang kedua terbesar di kawasan Bali-Nusra setelah Bali, terutama jika program hilirisasi, infrastruktur, dan investasi pariwisata terus dipercepat.

Gambar 14 Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Regional NTB-Bali-NTT



Sumber : BRIN, 2026 (data diolah)

3.1.13 Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Wilayah NTB terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta 401 pulau kecil yang tersebar di sekitarnya dengan luas wilayah kurang lebih 4.758.132 hektare, terbagi menjadi dua yakni

wilayah darat dengan luas kurang lebih 1.966.639 hektare (41 persen); dan wilayah laut dengan luas kurang lebih 2.791.492 hektare (59 persen) serta panjang garis pantai mencapai kurang lebih 2.999,54 Km². Kondisi geografis ini bukan sekedar angka statistik melainkan representasi potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan produktivitasnya terutama dari sisi kelautan.

Ekonomi biru menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut yang tidak hanya produktif secara ekonomi namun juga menjaga integritas ekosistem dan memastikan distribusi manfaat yang berkeadilan. Ekonomi biru merupakan salah satu dari delapan transformasi ekonomi utama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, RPJPD Provinsi NTB 2025-2045 serta RPJMD Provinsi NTB 2025-2029.

Indeks Ekonomi Biru Indonesia atau *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) berfungsi sebagai alat pengukuran komprehensif dan panduan kebijakan yang mengevaluasi perkembangan ekonomi biru melalui tiga pilar utama yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Indeks Ekonomi Biru Provinsi NTB sampai saat ini telah mencapai 50,73 poin. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi NTT dan Bali. Capaian ini didukung oleh pencapaian pada indeks pilar lingkungan sebesar 47,43 poin terutama pada subpilar energi terbarukan yang terus meningkat dan indeks pilar sosial sebesar 51,14 poin terutama pada subpilar Pendidikan dan kesehatan yang meningkat cukup signifikan sedangkan indeks pilar ekonomi baru mencapai 16,91 poin yang dipengaruhi belum optimalnya pada subpilar perikanan tangkap dan budidaya, industri berbasis kelautan serta perdagangan, transport dan logistik.

3.2 Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Daerah Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi RPJPD Provinsi NTB 2025-2045 dan RPJMD Provinsi NTB 2025-2029, hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025. Terdapat 7 (tujuh) prioritas daerah pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut:

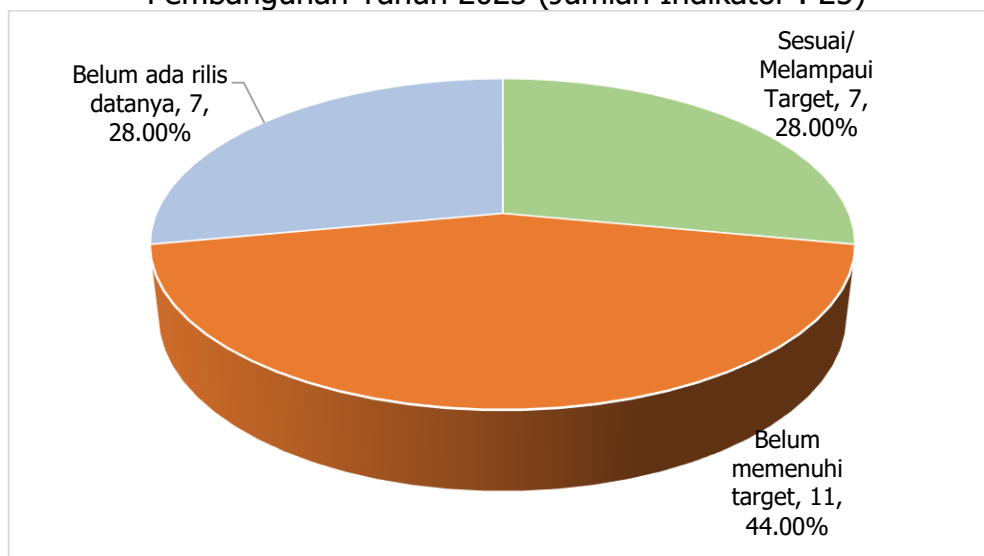
1. Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif, dengan tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter unggul, sehat, produktif, dan

- kompetitif. sedangkan sasaran strategisnya yaitu (a) Meningkatnya akses dan layanan pendidikan berkualitas yang merata di NTB; (b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan (c) Meningkatnya penguatan ketahanan dan keharmonisan keluarga, serta kesetaraan gender.
2. Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan, melalui 2 tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi daerah, dan Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat. Sedangkan sasaran strategisnya yaitu (a) Meningkatnya produktivitas UMKM, Koperasi, dan nilai tambah perdagangan; (b) Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran; (c) Meningkatnya ketersediaan akses keuangan; (d) Meningkatnya taraf hidup masyarakat; (e) Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan; (f) Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan; dan (g) Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi.
 3. Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan, dengan tujuan pembangunan Terwujudnya pembangunan ekosistem industri komoditi unggulan daerah yang berkelanjutan. Adapun sasaran strategisnya yaitu (a) Meningkatnya kontribusi industri agromaritim; dan (b) Meningkatnya produktivitas sektor agromaritim (pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, dan kehutanan).
 4. Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi, dengan 3 tujuan pembangunan yaitu (a) Terwujudnya pariwisata NTB yang berkualitas dan industri ekonomi kreatif, (b) Terwujudnya pengembangan kebudayaan daerah dan ketahanan sosial budaya, dan (c) Terwujudnya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga. Sedangkan sasaran strategisnya yaitu (a) Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif; (b) Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya; dan (c) Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga.
 5. Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim, dengan 3 tujuan pembangunan yaitu (a) Terwujudnya peningkatan resiliensi terhadap bencana; (b) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan (c) Terwujudnya investasi berkelanjutan.

6. Transformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan, dengan tujuan yaitu Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan, dan Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Adapun sasaran strategisnya yaitu Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang terintegrasi, dan Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif, dengan tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif serta kepemimpinan daerah yang kolaboratif. Adapun sasaran strategisnya yaitu (a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah; (b) Meningkatnya penegakan hukum yang adil dan terpeliharanya stabilitas keamanan untuk mendukung demokrasi yang berkualitas; dan (c) Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Seluruh indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian prioritas daerah, diukur melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah Tahun 2025. Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah NTB tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

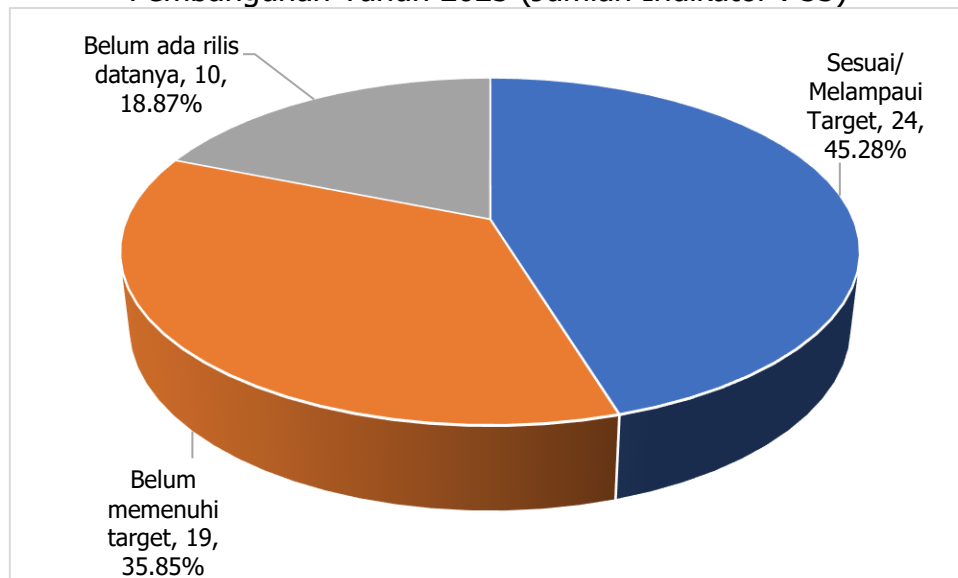
Gambar 15 Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Tahun 2025 (Jumlah Indikator : 25)



Sumber : data diolah, 2026

Berdasarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja tujuan, dari 25 indikator kinerja, sebanyak 7 indikator atau 28,00 persen telah sesuai bahkan memenuhi target dan 11 indikator atau 44,00 persen belum memenuhi target, sedangkan 7 indikator lainnya belum ada rilis data dari lembaga terkait. Indikator yang sesuai bahkan melampaui target yaitu Tingkat Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku, Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang

Gambar 16 Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pembangunan Tahun 2025 (Jumlah Indikator : 53)



Sumber : data diolah, 2026

Sementara itu, berdasarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis pembangunan daerah, dari 53 indikator kinerja, sebanyak 24 indikator atau 45,28 persen telah sesuai dan bahkan melampaui target dan 19 indikator atau 35,85 persen belum memenuhi target, dan sebanyak 10 indikator belum tersedia datanya karena belum ada rilis dari Lembaga terkait.. Indikator kinerja yang telah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa, Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik, Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, Reformasi Birokrasi General, Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun, Rasio PDRB

Industri Ekonomi Kreatif, Rasio Konektivitas, Rasio kewirausahaan Daerah, Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional, Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim, Persentase Kebijakan Berbasis Bukti, Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah, Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara , Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kesejahteraan Sosial, dan Indeks Desa.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis pembangunan daerah yang belum memenuhi target yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda, Reformasi Birokrasi Tematik, Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah, Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang, Konsumsi Listrik per kapita, Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi, Intensitas energi primer, Inklusi Keuangan, Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi, Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), Harapan Lama Sekolah.

Tabel 12 Target dan Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Daerah Tahun 2025 Provinsi NTB

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Visi : NUSA TENGGARA BARAT BANGKIT BERSAMA MENUJU PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR MENDUNIA								
Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif								
	Tujuan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif	1 Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54 (2023)	0.56	NA	NA
			2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	65.51	66.71	63.70	95.49
	Sasaran 1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	1 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	7.87	8,6-8,63	8.87	102.78
			2 Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.98	14,1-14,13	13.99	99.22
			3 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9.44	10.02	11.63	116.07
			4 Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			a) Literasi Membaca	%	NA	10	NA	NA
			b) Numerasi	%	NA	0,00-10,00	NA	NA
			5 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					
			a) Literasi Membaca	%	NA	26,24-28,74	NA	NA
			b) Numerasi	%	NA	22,68-25,18	NA	NA
Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72.25	72.92	72.60	99.56
			2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29.8	21.7	13.39	138.29
Sasaran 3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender		1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.53	0.517	0.515	100.39
			2 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60.02	61.70	63.70	103.24

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 2 : Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan								
	Tujuan 2	Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi :				
			1a	- Dengan Tambang	%	5.30	6.00	3.22
			1b	- NonTambang	%	3.87	6,00 - 6,50	8.33
			2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.83	0.84	0.82
	Sasaran 4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	1	Rasio kewirausahaan Daerah	%	0.12	2.37	10.03
			2	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0.95	0.97	0.93
			3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14.20	14.27	14.67
	Tujuan 3	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat	1	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32.28	35.80	33.67
							94.05	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025				
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		Sasaran 5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	35,182.00	35,408.24	36,010.28	101.70
				2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.73	2,19-2,79	3.05	90.68
		Sasaran 6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	1	Inklusi Keuangan	%	NA	88.70	80.51	90.77
		Tujuan 4	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali	1a	Tingkat Kemiskinan	%	11.91	11,68-12,18	11.38	102.57
				1b	Tingkat Kemiskinan Ekstrem NTB	%	2.04	1.64	0.40	175.61
				2	Rasio Gini	Poin	0.364	0,369-0,373	0.364	101.36
				3	Tingkat Inflasi	%	1,28	3-3,7	3.01	100.00
		Sasaran 7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	46.00	49.21	106.98
		Sasaran 8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.44	78.8322	74.70	94.76
		Sasaran 9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	1	Indeks Desa	(%)	77.08	77.88	78.57	100.89

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025				
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		Sasaran 10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	7.30	16.21	-22.05
3	Misi 3 : Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan									
		Tujuan 5	Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3.87	4.21	6.69	158.91
		Sasaran 11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	1	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	%	5.30	5,3 - 6,4	9.80	153.13
		Sasaran 12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	1	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1.54	3.20	5.03	157.19
4	Misi 4 : Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga									
		Tujuan 6	Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif	1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	%	11.45	11.64	11.75	100.96
				2	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	NA	0.39	NA	NA

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025			
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Sasaran 13	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349,447	382,813	509,171	133.01
			2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.75	2.03	1.81	89.16
			3	Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%	3.72	3.76	4.33	115.25
	Tujuan 7	Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,37 (2023)	58,64-58,78	NA	NA
	Sasaran 14	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	1	Indeks budaya literasi	Indeks	(2023) 61.20	64.42	NA	NA
			2	Indeks ekspresi budaya	Indeks	39.74 (2023)	44.48	NA	NA
			3	Indeks warisan budaya	Indeks	48.37 (2023)	50.17	NA	NA
			4	Indeks ekonomi budaya	Indeks	41.92 (2023)	44.26	NA	NA
	Tujuan 8	Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga	1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	53,67 (2023)	53.94	55.50	102.90
			2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0.345	0.346	NA	NA

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025				
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		Sasaran 15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	69.68	70.18	69.97	99.70
				2	Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)	(43 medali)	9,3 (47 medali)	23,40 (58 medali)	251.61
				3	Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	%	100	100	100	100
5	Misi 5 : Memperkuat Sistim Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan									
		Tujuan 9	Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana	1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113.64	135.41	156.02	84.78
		Sasaran 16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.56	0.59	0.55	93.22
		Tujuan 10	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	NA	0.536	NA	NA
				2	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	NA	15.31	13.80	90.14
		Sasaran 17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.78	76.19	77.40	101.59

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025				
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
6	Misi 6 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawaasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan	Sasaran 18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0.327	0.331	0.331	100.00
				2	Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik	%	0.05	0.10	0.10	100.00
		Sasaran 19	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	1	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	192.23	123.53	64.26
				2	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	709.00	751.00	747.74	99.57
		Tujuan 11	Terwujudnya Investasi Berkelanjutan	1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	31.8	36.9	34.31	92.98
		Sasaran 20	Meningkatnya Realisasi Investasi	1	Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	54.55	61.09	61.10	100.02
		Tujuan 12	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan	1	Indeks Kemantapan Infrastruktur	Indeks	74.96	76.35	74.90	98.11

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025				
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		Sasaran 21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	75.83	76.21	70.12	92.01
		2	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67.74	71,68-71,7	71.49	99.73		
		3	Rasio Konektivitas	Rasio	0.82	0.83	0.83	100.12		
		Tujuan 13	Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	62.17	63.05	62.17	98.60	
		Sasaran 22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang	%	83.13	83.38	83.13	99.70	
		7	Misi 7 : Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah							
	Tujuan 14	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif	1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks (Kategori)	77,99 (BB)	78,77 (BB)	77.46	98.34	
			2	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	3.01	3.03	NA	NA	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			3 Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63.40	76.50	73.25	95.75
	Sasaran 23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1a Reformasi Birokrasi General	Skor	68.8	69.49	70.50	101.46
			1b Reformasi Birokrasi Tematik	Skor	9.19	9.28	6.96	74.98
			2 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1.241	1.100	0.598	54.36
			3 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	91.47	91.50	87.39	95.51
	Sasaran 24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	1 Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76.37	75,37-78,63	75.27	99.87
			2 Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	NA	65.00	59.00	90.77
			3 Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	49.76	75.00	83.08	110.77

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025				
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		Sasaran 25	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	NA	50	60	120.00
				2	Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	%	94.63	95.58	100.00	104.63

Sumber : data diolah, 2026

Keterangan:

1. NA = Data belum tersedia/rilis

Keberhasilan dalam mewujudkan target-target pembangunan daerah pada tahun 2025, didukung oleh pelaksanaan program prioritas/program unggulan daerah. Dalam RPJMD 2025-2029 sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Perubahan RKPD Provinsi NTB tahun 2025, terdapat 10 program unggulan yaitu NTB SEHAT DAN CERDAS, DESA BERDAYA, NTB INKLUSIF, NTB AGRO MARITIM, NTB PARIWISATA BERKUALITAS, E-MANIA (EKRAF MENDUNIA), NTB TERAMPIL DAN TANGKAS, NTB LESTARI BERKELANJUTAN, NTB GOOD and SMART GOVERNANCE, dan NTB CONNECTED. Deskripsi pelaksanaan Program Unggulan tersebut pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. NTB SEHAT DAN CERDAS

Program Unggulan NTB Sehat dan Cerdas dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk memperkuat fondasi pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan, memastikan kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dengan perbaikan sarana prasarana serta kualitas SDM pengelola kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Provinsi, Membangun dua rumah sakit rujukan utama (Mega Hospital) masing-masing di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dan mengembangkan Telemedicine yang menghubungkan rumah sakit rujukan utama dengan seluruh Puskesmas di NTB.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB Sehat dan Cerdas diantaranya sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Layanan Kesehatan antara lain melalui :
 - Pengembangan layanan rumah sakit, seperti peningkatan kelas RS HL Manambai Abdulkadir dari kelas C menjadi kelas B, Perubahan status RS Jiwa Mutiara Sukma menjadi RS Mutiara Sukma dengan pengembangan layanan selain kesehatan jiwa;
 - Penguatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas, dengan melakukan pendampingan, pembinaan dan pemantauan.
 - Penguatan layanan telemedicine / Layanan medis terpercaya yang dapat mewujudkan akses kesehatan terjangkau secara online melalui pembinaan dan pendampingan rumah sakit, puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu.

- Peningkatan cakupan dan keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- b. Memperkuat strategi penanganan stunting dengan pendekatan promotif dan preventif yang mencakup seluruh siklus hidup. Intervensi tidak hanya menyasar balita, tetapi dimulai sejak remaja putri sebagai calon ibu, ibu hamil, ibu menyusui hingga anak usia sekolah melalui Aksi Bergizi di sekolah yang menyasar remaja putri untuk mencegah kekurangan gizi sejak dini. Program ini tidak hanya berisi edukasi tetapi juga intervensi gizi, penguatan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup sehat. Program Makan Bergizi Gratis juga diiriskan untuk mendukung pemenuhan gizi anak dan remaja. Selain itu, edukasi gizi diperkuat hingga ke tingkat keluarga dengan memanfaatkan jejaring Posyandu yang saat ini berjumlah sekitar 7.800 unit dengan lebih dari 41 ribu kader di seluruh NTB. Jejaring ini menjadi kekuatan utama dalam pemantauan pertumbuhan balita, penyebaran informasi serta deteksi dini risiko stunting.
- c. Memperkuat sistem rujukan bagi balita yang membutuhkan penanganan lanjutan agar intervensi yang diberikan sesuai standar layanan kesehatan.
- d. Mengintegrasikan program untuk anak-anak, termasuk inisiatif gizi (MBG/Makanan Bergizi Gratis) agar anak sehat dan cerdas, mendukung Program Strategis Nasional.
- e. Peningkatan cakupan penemuan penderita TB dan keberhasilan pengobatan penderita TB melalui *active case finding* (ACF) dan skrining TBC di daerah-daerah berisiko tinggi. Investigasi kontak juga dilakukan pada kasus indeks dengan melibatkan kader kesehatan dan penemuan aktif dari fasyankes swasta yang terlibat dalam kegiatan DPPM (*distric public private mix*). Untuk pencegahan, sudah dilakukan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada orang berisiko seperti pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak yang kontak serumah dengan pasien TB terkonfirmasi bakteriologis.
- f. Peningkatan akses pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
- g. Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS).
- h. Penangan DO SMA melalui SMA Terbuka.
- i. Peningkatan Mutu melalui sertifikasi SP.

- j. Pengadaan Perlengkapan Peserta didik siswa miskin pada jenjang SMA, SMK, dan SBL.
- k. Pemberian makanan dan minuman ke peserta didik SLB yang tinggal di asrama.

2. DESA BERDAYA

Program Unggulan DESA BERDAYA dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk penguatan pembangunan desa melalui dukungan bantuan teknis, bantuan pendampingan, bantuan keuangan dan bantuan sosial untuk memperkuat fondasi pembangunan desa/ kelurahan dan memastikan agar potensi sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, layanan dasar dan tata kelola pemerintahan desa terkelola dengan baik, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin dan jumlah angka kemiskinan berkurang.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi Desa Berdaya diantaranya sebagai berikut:

- a. Penetapan regulasi untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Program Desa Berdaya melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Desa Berdaya.
- b. Penetapan Desa Berdaya Transformatif sebanyak 40 Desa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 100.3.3.1-50/Tahun 2025 Tentang Penetapan Desa Berdaya Transformatif Provinsi NTB Tahun 2026.
- c. Penetapan Lokasi Prioritas Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Provinsi NTB Tahun 2025 sebanyak 106 Desa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 100.3.3.1-569/Tahun 2025 Tentang Lokasi Prioritas Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Provinsi NTB Tahun 2025.
- d. Perekrutan Tenaga Pedamping Desa yang tersebar 40 Desa Berdaya.

3. NTB INKLUSIF

Program Unggulan NTB INKLUSIF dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan sistem perlindungan sosial

dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan yang proporsional, serta memastikan NTB menjadi “rumah bersama” untuk semuanya sehingga terwujud kohesi sosial yang kuat antar lapisan dan kelompok masyarakat.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB Inklusif diantaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) untuk mendorong pengarusutamaan isu-isu GEDSI ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2026.
- b. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan pengemis.
- c. Pemenuhan kebutuhan spesifik kelompok rentan ketika terjadi bencana
- d. Pemberdayaan masyarakat rentan seperti perempuan, remaja dan disabilitas melalui pelatihan keterampilan usaha dan pemberian Toolkit atau alat usaha.

4. NTB AGRO MARITIM

Program Unggulan NTB AGRO MARITIM dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan membuka sebanyak mungkin kesempatan kerja baru melalui pembangunan ekosistem yang kuat bagi industrialisasi berbasis pertanian, peternakan dan kelautan perikanan, serta menjadikan NTB sebagai Kawasan Industri Agromaritim yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB Agro Maritim diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyusunan Roadmap Industri Agromaritim NTB 2025–2029 sebagai pedoman strategis pembangunan industri daerah berbasis potensi unggulan daerah serta sebagai arah pengembangan industri hulu hingga hilir yang terintegrasi.
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) antara lain Pelatihan Proses Produksi Primer dan Sekunder Olahan Tembakau, Bimtek Pembuatan Olahan Kelapa dan Turunannya, Bimtek

Pengolahan Bambu, Industri Turunan Tembakau, Pelatihan Tenun dan Desain bagi IKM Tenun, Bimtek Manajemen Pengelolaan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)/APHT, serta Bimtek Pemantapan Mesin Kemasan.

- c. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi halal bagi produk IKM, serta pendampingan peningkatan kualitas kemasan produk dan promosi produk industri daerah untuk memperkuat daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.
- d. Penguatan dan revitalisasi Rumah Produksi Balai Kemasan Produk Daerah NTB sebagai pusat layanan kemasan, desain produk, standarisasi mutu serta inkubasi pengembangan produk IKM agar memiliki nilai tambah dan daya saing pasar.
- e. Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan daerah, seperti industri olahan tembakau, kelapa, bambu, rumput laut, hasil perikanan dan komoditas agro lainnya yang memiliki potensi besar dalam mendukung industrialisasi daerah.
- f. Fasilitasi penggunaan teknologi dan mesin produksi bagi IKM, termasuk bantuan dan pelatihan penggunaan mesin pengolahan dan pengemasan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses produksi.
- g. Penguatan jejaring kemitraan industri dan promosi produk industri daerah, melalui pameran industri, promosi produk unggulan daerah, serta pengembangan akses pasar bagi IKM NTB di tingkat nasional maupun internasional.
- h. Penguatan ekosistem inovasi industri dan hilirisasi komoditas unggulan daerah, melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas industri guna meningkatkan nilai tambah produk agromaritim NTB.
- i. Penyusunan dan penguatan kebijakan pengembangan kawasan dan sentra industri baru serta Perencanaan Pembangunan Industri Kab/ Kota berbasis potensi lokal, sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan industri serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah

5. NTB PARIWISATA BERKUALITAS

Program Unggulan NTB Pariwisata Berkualitas dalam periode 2025–2030 diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan berkualitas yaitu

wisatawan yang memiliki lama tinggal (*length of stay*) lebih panjang dan tingkat pengeluaran (*spending*) yang lebih tinggi dengan tetap menjaga biaya sosial dan lingkungan yang rendah (*low social cost*) bagi masyarakat dan kawasan destinasi. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah yang menekankan konsep *quality tourism* yaitu pembangunan pariwisata yang berorientasi pada nilai tambah ekonomi, keberlanjutan lingkungan serta pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, strategi pembangunan pariwisata NTB diarahkan melalui beberapa pendekatan utama, antara lain penguatan segmen MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) sebagai pasar wisata bernilai ekonomi tinggi, pengembangan segmen wisata minat khusus seperti Muslim-Friendly Tourism serta pengembangan kawasan wisata tersegmentasi sesuai dengan karakteristik pasar wisatawan. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan destinasi wisata baru di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, sekaligus memperkuat aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi pariwisata guna memperluas sebaran kunjungan wisatawan serta meningkatkan daya saing pariwisata daerah.

Dalam rangka mewujudkan target tersebut, pada tahun 2025 telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari implementasi Program NTB Pariwisata Berkualitas, antara lain sebagai berikut:

a. Penyusunan Pedoman Implementasi Pariwisata Berkualitas.

Penyusunan pedoman implementasi pariwisata berkualitas sebagai instrumen evaluasi dan pengukuran kualitas pariwisata daerah yang mencakup aspek pengelolaan destinasi, kualitas layanan, keberlanjutan lingkungan serta dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Pedoman ini menjadi acuan dalam memastikan bahwa pengembangan pariwisata NTB berjalan sesuai dengan prinsip sustainable dan *quality tourism*.

b. Pemanfaatan Kawasan Mandalika untuk Sport Tourism Internasional

Optimalisasi pemanfaatan Sirkuit Mandalika sebagai pusat kegiatan *sport tourism* internasional yang mampu meningkatkan citra destinasi NTB di tingkat global. Penyelenggaraan berbagai event olahraga internasional di kawasan ini

memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat terutama pada sektor UMKM, transportasi lokal, kuliner serta akomodasi penginapan.

c. Peningkatan Konektivitas Transportasi Udara

Peningkatan aksesibilitas pariwisata melalui penambahan rute penerbangan baru, antara lain Labuan Bajo – BIZAM, Banyuwangi – Lombok serta Lombok – Malang serta inisiasi pembukaan rute internasional seperti Lombok – Darwin (Australia) dan Lombok – Bangkok (Thailand). Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat memperluas pasar wisatawan serta meningkatkan daya saing destinasi NTB di kawasan regional.

d. Inisiasi Pengembangan Transportasi *Seaplane*

Pengembangan konektivitas wisata melalui inisiasi transportasi *seaplane* menuju destinasi wisata unggulan yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat maupun udara. Dalam mendukung rencana tersebut, Bendungan Batujai dipersiapkan sebagai salah satu lokasi pelabuhan *seaplane* (*water aerodrome*) yang dapat menghubungkan berbagai destinasi wisata di NTB secara lebih cepat dan efisien.

e. Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta penerapan standar CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*) pada hotel dan destinasi wisata guna menjamin kualitas layanan serta meningkatkan kepercayaan wisatawan.

f. Peningkatan Kualitas Destinasi Unggulan

Peningkatan kualitas destinasi pariwisata melalui penataan kawasan, peningkatan amenitas serta penguatan tata kelola destinasi pada beberapa kawasan strategis, antara lain Senggigi, kawasan tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air), kawasan Sembalun, kawasan Mandalika serta kawasan Kota Mataram sebagai pusat layanan pariwisata.

g. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Event Pariwisata

Penyelenggaraan berbagai event pariwisata sebagai strategi peningkatan kunjungan wisatawan serta promosi destinasi NTB di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2025, event yang dilaksanakan didominasi oleh *sport*

tourism event, antara lain *Senggigi Surfing Event*, *Selong Selo Event*, *Rinjani Thril Run*, *Sky Lancing Paragliding* serta *Merumatta Thrill Run*. Selain itu, Dinas Pariwisata juga menyelenggarakan berbagai event budaya dan promosi destinasi, seperti Festival Bau Nyale, Khazanah Ramadan, Senggigi Festival, Museum Lombok Sumbawa Civilization, Lombok Sumbawa Festival serta *Live Cooking Event* yang menampilkan kekayaan kuliner lokal NTB.

Pelaksanaan berbagai event tersebut dilakukan melalui kolaborasi multi pihak (*pentahelix*) antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, komunitas kreatif, media serta sektor swasta. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan lama tinggal wisatawan serta peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara keseluruhan, implementasi program NTB Pariwisata Berkualitas menunjukkan bahwa arah pembangunan pariwisata daerah tidak lagi hanya berorientasi pada kuantitas kunjungan wisatawan tetapi lebih menekankan pada peningkatan kualitas pengalaman wisata, nilai tambah ekonomi serta keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

6. E-MANIA (EKRAF MENDUNIA)

Program Unggulan NTB E-Mania (Ekonomi Kreatif Mendunia) dalam periode 2025–2030 diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, inovatif dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini memberikan ruang yang luas bagi generasi muda, komunitas kreatif serta pelaku usaha lokal untuk berkreasi dan berinovasi dalam menghasilkan produk dan jasa kreatif yang berkualitas, kompetitif serta mampu menembus pasar nasional maupun global.

Pengembangan ekonomi kreatif di NTB juga didorong untuk memperkuat posisi daerah sebagai bagian dari super hub pariwisata dan ekonomi kreatif kawasan Bali–Nusra, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Dengan potensi budaya, kreativitas masyarakat serta

dukungan sektor pariwisata yang kuat, ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru (*new engine of growth*) bagi daerah, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda.

Secara nasional terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif dengan beberapa sub sektor prioritas yang relevan untuk dikembangkan di NTB seperti kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan serta sub sektor kreatif berbasis digital dan media. Pengembangan subsektor tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai nilai ekonomi kreatif mulai dari proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi hingga konservasi sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Program NTB E-Mania (Ekraf Mendunia) antara lain sebagai berikut:

a. Penyusunan Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penyusunan kajian pengembangan ekonomi kreatif dilakukan sebagai dasar dalam memetakan potensi dan sektor unggulan subsektor ekonomi kreatif di NTB sehingga dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan, program serta strategi pengembangan ekonomi kreatif daerah secara lebih terarah dan berbasis data.

b. Validasi dan Verifikasi Data Pelaku Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-NTB untuk melakukan validasi dan verifikasi data pelaku ekonomi kreatif di seluruh wilayah NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh basis data pelaku ekonomi kreatif yang akurat dan terintegrasi sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif daerah.

c. Penguatan Basis Data Pelaku Ekonomi Kreatif

Penguatan data pelaku ekonomi kreatif dilakukan sebagai pondasi awal dalam peningkatan kelas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, khususnya dalam mendorong pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum melalui Hak

Kekayaan Intelektual (HKI), peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan pasar.

d. Peningkatan Pemahaman Pelaku Ekonomi Kreatif terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Upaya peningkatan literasi pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan mengenai pentingnya sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk atau jasa yang dihasilkan. Perlindungan HKI diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi produk kreatif serta memperkuat identitas dan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global.

e. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Kreatif

Pemerintah daerah mendorong optimalisasi pemanfaatan ruang kreatif (*creative space*) melalui fasilitasi penyelenggaraan berbagai event kreatif bagi UMKM dan komunitas ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor kriya, fesyen, kuliner dan seni pertunjukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas ruang ekspresi, memperkuat jejaring komunitas kreatif serta meningkatkan eksposur produk kreatif NTB kepada masyarakat dan wisatawan.

Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif NTB

Dalam rangka memperkuat implementasi Program NTB E-Mania (Ekraf Mendunia) pada periode mendatang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan beberapa kebijakan strategis sebagai berikut:

- a. Penguatan Data dan Informasi Ekonomi Kreatif (Ekraf Data)
Pengembangan sistem basis data ekonomi kreatif yang terintegrasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan pembangunan ekonomi kreatif berbasis data.
- b. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif (Ekraf Bijak)
Penguatan kebijakan daerah serta pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif di NTB.
- c. Pengembangan Talenta dan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (Talenta Ekraf)
Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, inkubasi

bisnis, mentoring serta peningkatan kompetensi kewirausahaan bagi generasi muda dan komunitas kreatif.

- d. Pengembangan Infrastruktur dan Ruang Kreatif (Infra Ekraf)
Pengembangan dan optimalisasi ruang kreatif, creative hub serta fasilitas produksi dan pemasaran produk kreatif untuk mendukung aktivitas komunitas dan pelaku usaha kreatif.
- e. Penguatan Kolaborasi Ekosistem Ekonomi Kreatif (Sinergi Ekraf)
Penguatan kolaborasi hexahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media dan investor dalam pengembangan produk kreatif serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif daerah.
- f. Perluasan Pasar Produk Kreatif (Pasar Ekraf)
- g. Penguatan strategi pemasaran produk ekonomi kreatif melalui promosi digital, pameran, festival kreatif serta integrasi produk ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata.
- h. Pengembangan Akses Pendanaan dan Investasi (Dana Ekraf)
Fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, investor serta program pembiayaan berbasis kewirausahaan kreatif.
- i. Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual (Ekraf Kaya)
Peningkatan jumlah produk kreatif yang memiliki perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, perlindungan hukum, serta daya saing produk kreatif NTB di pasar global.

7. NTB TERAMPIL DAN TANGKAS

Program Unggulan NTB TERAMPIL DAN TANGKAS dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk memperkuat pondasi pembangunan sektor tenaga kerja dengan meningkatkan ketersediaan tenaga terampil, meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga terampil di dalam dan luar negeri serta meningkatkan akses dan perlindungan bagi pekerja migran serta meningkatkan prestasi olahraga kaum muda NTB, dan memastikan NTB sukses prestasi dan penyelenggaraan pada PON 2028.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB TERAMPIL DAN TANGKAS diantaranya sebagai berikut:

- a. Tersusunnya Buku Roadmap Rencana Tenaga Kerja Daerah (RRTKD), sebagai dokumen perencanaan sistematis yang disusun pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam jangka menengah.
- b. Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK).
- c. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua (LSP P2).
- d. peningkatan kualitas pelatihan vokasi, evaluasi dan penguatan koordinasi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV).
- e. Fasilitasi perekrutan magang jepang.
- f. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi di BLK (*skill Center*).
- g. Akreditasi Lembaga Pelatihan kerja.
- h. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- i. Pelaksanaan *Business matching* (1. Mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja untuk berdialog langsung dengan pemerintah dan memberikan masukan sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan 2. Mendorong peningkatan pelayanan dan jumlah penempatan tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran).
- j. Pembinaan Hubungan Industrial.
- k. Pelaksanaan Job fair.
- l. Penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Daerah (AKD), Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
- m. Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Perusahaan Strategis Nasional.
- n. Pemberian BPJS ketenagakerjaan untuk JKK dan JKM bagi pekerja baik dalam dan luar negeri.
- o. Peningkatan Kompetensi pendidik SMA, SMK, dan SLB.
- p. Fasilitasi sertifikasi pendidik.
- q. Relisensi lembaga LSP- P1 di sekolah.
- r. Pembinaan kelembagaan SMK.

8. NTB LESTARI BERKELANJUTAN

Program Unggulan NTB LESTARI DAN BERKELANJUTAN dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk memastikan terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dengan penguatan sektor kehutanan, pelestarian lingkungan di kawasan pesisir, meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan pengarusutamaan pemanfaatan energi ramah lingkungan di berbagai sektor pembangunan.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB LESTARI DAN BERKELANJUTAN diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan penguatan kapasitas kelompok Program Kampung Iklim (Proklim). Pembinaan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas pelaporan kegiatan, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
- b. Pendampingan sekolah adiwiyata. Sekolah Adiwiyata berperan aktif dalam pengendalian pencemaran air melalui penerapan program-program konservasi dan pengelolaan limbah cair berbasis partisipatif. Tujuan utamanya adalah mengurangi pemborosan air, mencegah pencemaran sumber air (tanah dan sungai), serta meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk menghemat dan menjaga kebersihan air.
- c. Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi PROPER. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat pengendalian kualitas lingkungan khususnya terhadap kualitas air, serta penegakan hukum lingkungan.
- d. Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (*Eco Office*).
- e. Pengendalian pencemaran udara melalui KLHS dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) pemerintah.
- f. Fasilitasi perizinan lingkungan sebagai upaya ini dilakukan sebagai instrumen preventif yang krusial untuk memastikan setiap aktivitas usaha/kegiatan di pesisir dan laut mematuhi standar lingkungan hidup. Perizinan ini mewajibkan

pelaku usaha untuk mengelola limbah dan dampak sebelum operasional dimulai.

- g. Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan lingkungan.
- h. Patroli pencegahan dan pengamanan hutan.
- i. Monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu.
- j. Rehabilitasi hutan dan lahan.
- k. Mendorong kerjasama Pembangunan Rendah Karbon dengan *Low Carbon Development Initiative* - Bappenas yang ditandatangani sejak tahun 2023 dan mitra pembangunan lainnya dalam usaha penurunan emisi gas rumah kaca.
- l. Mendorong peningkatan bauran energi terbarukan yang sampai saat ini telah mencapai 25,07%.

9. NTB GOOD AND SMART GOVERNANCE

Program Unggulan *NTB GOOD AND SMART GOVERNANCE* dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk Reformasi Birokrasi Menuju Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) melalui pembangunan sistem karir yang meritokratis, memastikan pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan transparansi serta efektifitas dalam pengelolaan asset dan sumberdaya lainnya, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif, peningkatan kualitas pelayanan publik ke arah pelayanan publik yang prima serta transformasi digital secara gradual dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi *NTB GOOD AND SMART GOVERNANCE* diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung efisiensi pelayanan, melalui:
 - 1) Melakukan FGD Reviu Tata Kelola dan Manajemen SPBE.
 - 2) Melakukan FGD Reviu Kebijakan Internal SPBE.
 - 3) Penyusunan Turunan Kebijakan Internal SPBE.
 - 4) Melaksanakan Audit TIK (Infrastruktur dan Aplikasi SPBE).

- 5) Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko SPBE.
- 6) Penyiapan integrasi layanan SPBE melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
- b. Meningkatkan implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, melalui:
 - 1) Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (4) tentang Penyelenggaraan SPBE.
 - 2) rapat koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran SPBE secara terintegrasi.
- c. Mendorong integrasi tata kelola data perencanaan, keuangan, dan SDM untuk pembangunan berbasis bukti melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), melalui:
 - 1) Asistensi laporan keuangan perangkat daerah.
 - 2) Reviu laporan keuangan.
 - 3) Penyusunan LKPD berbasis bukti yang memadai.
- d. Menerapkan sistem karier meritokrasi dan meningkatkan integritas ASN dengan menyelenggarakan Beauty Contest untuk menjangkau jabatan administrator (eselon III), dan seleksi terbuka untuk jabatan tinggi pratama (eselon II).
- e. Mempermudah akses layanan publik melalui platform digital (SPAN LAPOR), melalui:
 - 1) Melakukan Sosialisasi Keputusan Gubernur NTB Nomor: 047 - 299 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemprov NTB.
 - 2) Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Tingkat Provinsi NTB.
 - 3) Melakukan Rakor Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Tahun 2025.
 - 4) Melakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - 5) Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
- f. Meningkatkan pelayanan publik melalui:

- 1) Melakukan Pemantauan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri di Provinsi NTB.
 - 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri di Provinsi NTB.
 - 3) Melaksanakan pendampingan proses pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Perangkat Daerah yang ditetapkan secara nasional sebagai locus penilaian.
 - 4) Melaksanakan sosialisasi instrumen penilaian tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik.
 - 5) Memetakan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik melalui aplikasi SiMASKOT.
- g. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:
- 1) Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi evaluator Kementerian PAN RB untuk perbaikan implementasi SAKIP.
 - 2) Membentuk Tim Implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi NTB.
 - 3) Pemanfaatan aplikasi e-SAKIP dalam perencanaan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
 - 4) *Focus Group Discussion* Praktik Baik Implementasi SAKIP dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DIY.
 - 5) Monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- h. Meningkatkan keberhasilan pembangunan Zona Integritas melalui:
- 1) Menetapkan *pilot project* ZI dan tim penilai internal.
 - 2) Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi evaluator untuk perbaikan implementasi pembangunan zona integritas.
 - 3) Melakukan asistensi Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK WBBM).
 - 4) Melakukan evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK WBBM.
- i. Meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui:
- 1) Melaksanakan Evaluasi Manajemen Risiko Pemda dan OPD.
 - 2) Melaksanakan Reviu Manajemen Risiko Pemda dan OPD.
 - 3) Melaksanakan Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP.

- 4) Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP.
- 5) Melaksanakan Penjaminan Kualitas SPIP.
- j. Mengawal Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI), melalui:
 - 1) Penanganan pengaduan masyarakat.
 - 2) Monitoring dan evaluasi atas implementasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP).
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Survei Penilaian Integritas (Melaksanakan sosialisasi SPI dan mengumpulkan data responden untuk dikirimkan ke KPK atau Tim surveyor).
 - 4) Melaksanakan Koordinasi Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi.
- k. Meningkatkan kualitas kebijakan melalui:
 - 1) Melakukan Identifikasi dan Analisis Peraturan Daerah.
 - 2) Melakukan Revisi Peraturan Daerah.
 - 3) Melakukan Evaluasi, Transparansi dan Partisipasi dalam rangka tercapainya Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).
 - 4) Meningkatkan reformasi hukum melalui penguatan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, peningkatan kompetensi perancang perundang-undangan, pemetaan peraturan yang berpotensi untuk deregulasi.
- l. Meningkatkan digitalisasi arsip, melalui:
 - 1) Menetapkan Kebijakan Kearsipan.
 - 2) Menetapkan Kelembagaan pengelolaan Simpul Jaringan Kearsipan Nasional (SIKN).
 - 3) Melakukan alih media arsip statis.
 - 4) Mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI ke seluruh Proses Bisnis Kearsipan.
 - 5) Meningkatkan Kompetensi SDM Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaring Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
- m. Meningkatkan pembangunan statistik, melalui:
 - 1) Penyusunan Metadata dan Instrumen Pengumpulan Data.
 - 2) Rapat Forum Data: Perencanaan Data Tahun 2025.
 - 3) Penyusunan Daftar Data dan Finalisasi Daftar Data Daerah.

- 4) Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Nusa Tenggara Barat Satu Data Tahun 2025.
- n. Meningkatkan tata kelola pengadaan, melalui:
- 1) Pemenuhan Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) level proaktif pada variabel- variabel pendukung tingkat kematangan.
 - 2) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa melalui Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan berdasarkan Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam pelaksanaan pengadaaan Barang/Jasa.
 - 4) Meningkatkan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
- o. Internalisasi implementasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

10. NTB CONNECTED

Program Unggulan NTB CONNECTED dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk percepatan pemantapan infrastruktur mendukung industrialisasi, pariwisata dan arus barang jasa termasuk pembangunan jalan lintas NTB/ Trans-NTB (Lembar-Sape) dan peningkatan Pelabuhan Lembar, Badas, Bima serta Pembangunan pelabuhan khusus komoditi di Pulau Sumbawa serta memastikan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar lainnya yang mencakup air bersih, rumah layak huni, jaringan listrik dan telekomunikasi.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB CONNECTED diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) jalan *Bypass Port to Port* (P2P) yang menghubungkan Pelabuhan Lembar (Lombok Barat) hingga Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi serta solusi mengatasi kepadatan lalu lintas di jalur tengah dan mengurangi waktu tempuh menjadi 1 jam 45 menit - 2 jam.

- b. Pembukaan tujuh rute penerbangan baru, yakni Banjarmasin, Palangkaraya, Labuan Bajo, Malang, Banyuwangi, Waingapu dan Tambolaka serta peningkatan Frekuensi Penerbangan ke Sumbawa ditingkatkan dari satu menjadi dua kali sehari dan Bima dari dua menjadi tiga kali sehari.
- c. Penguatan akses laut dengan membuka jalur kapal dari Bali ke Kuta Mandalika (NTB) hingga Labuan Bajo (NTT).
- d. Peningkatan kemantapan jalan melalui penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lenangguar-Lunyuk, Rekonstruksi Ruas Jalan Tanjung-Pohgading-Pringgabaya serta Rekonstruksi Ruas Jalan Simpang Tano-Simpang Seteluk.
- e. Peningkatan kualitas layanan irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Maronggek Kompleks.
- f. Optimalisasi infrastruktur layanan persampahan di TPA regional kebon kongok.
- g. Pembangunan Rumah Layak Huni.
- h. Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum sebagai Penunjang Kualitas Kawasan Permukiman.
- i. Penanganan Kumuh Kewenangan Provinsi pada Kawasan Permukiman.

3.3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

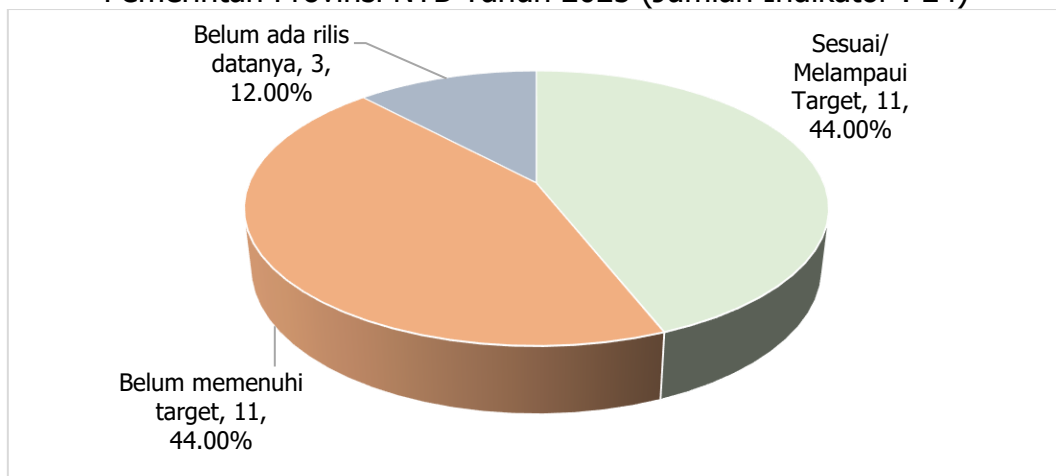
RPJMD menekankan pembangunan yang holistik, inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi berbasis kepulauan, pengelolaan lingkungan serta transformasi birokrasi. Tahun 2025 berperan sebagai fondasi awal dimana target-target kinerja mulai ditetapkan sebagai baseline untuk pencapaian lima tahun ke depan. Kinerja pembangunan daerah Pemerintah Provinsi NTB diukur melalui dua kelompok indikator utama yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Kinerja ini diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditentukan oleh masing-masing perangkat daerah berdasarkan cascading tujuan dan sasaran strategis

pembangunan daerah. Pada tahun 2025, jumlah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 24 indikator. Sebanyak 15 indikator (62 persen) dengan kategori tingkat ketercapaian “sangat tinggi”, 3 indikator (13 persen) dengan kategori tingkat ketercapaian “tinggi”, 1 indikator (4 persen) dengan kategori tingkat ketercapaian “rendah”, 1 indikator (4 persen) dengan kategori tingkat ketercapaian “sangat rendah”, dan 4 indikator (17 persen) masih belum tersedia datanya (*Not Available*).

Gambar 17 Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 (Jumlah Indikator : 24)



Sumber : data diolah, 2026

Adapun rincian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54 (2023)	0.56	NA	NA
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.53	0.517	0.515	100.39
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi :					
	- Dengan Tambang	%	5.30	6.00	3.22	53.67

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Non Tambang	%	3.87	6,00 - 6,50	8.33	128.15
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.83	0.84	0.82	97.16
5	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.5	3.55	3.53	99.44
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32.28	35.80	33.67	94.05
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.73	2,19-2,79	3.05	90.68
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	35,182.00	35,408.24	36,010.28	101.70
9	Inklusi Keuangan	%	NA	88.70	80.51	90.77
10	Tingkat Kemiskinan	%	11.91	11,68-12,18	11.38	102.57
11	Rasio Gini	Poin	0.364	0,369-0,373	0.364	101.36
12	Tingkat Inflasi	%	1,28	3-3,7	3.01	100.00
13	Indeks Desa	(%)	77.08	77.88	78.57	100.89
14	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.44	78.83	74.70	94.76
15	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3.87	4.21	6.69	158.91
16	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	NA	0.39	NA	NA
17	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349,447	382,813	509,171	133.01
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,37 (2023)	58,64-58,78	NA	NA
19	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113.64	135.41	156.02	84.78

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.78	76.19	77.40	101.59
21	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	NA	15.31	13.80	90.14
22	Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	54.55	61.09	61.10	100.02
23	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks (Kategori)	77,99 (BB)	78,77 (BB)	77.46	98.34
24	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63.4	76.50	73.25	95.75

Sumber : data diolah, 2026

Pada tahun 2025, terdapat 39 perangkat daerah dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 158 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dengan rata-rata pencapaian sebesar 98,19 persen. Sementara itu, capaian kinerja setiap perangkat daerah pada tahun 2025 dapat disajikan dalam rekapitulasi capaian IKU sebagai berikut:

Tabel 14 Predikat Kinerja Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

NO	NAMA OPD	RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD TAHUN 2025	PREDIKAT KINERJA	HASIL PENILAIAN KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024	
				NILAI CAPAIAN	PREDIKAT KINERJA
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	105.18	ISTIMEWA	92.87	BAIK
2	DINAS KESEHATAN	181.45	ISTIMEWA	85.41	BAIK
3	KESBANGPOL	99.02	BAIK	89.12	BAIK
4	BPBD	92.77	BAIK	83.49	BAIK
5	BPKAD	101.35	ISTIMEWA	101.35	ISTIMEWA
6	BAPPENDA	101.79	ISTIMEWA	100.79	ISTIMEWA
7	BPSDM	90.20	BAIK	81.18	BAIK
8	PENGHUBUNG	101.05	ISTIMEWA	90.95	BAIK
9	BAPPEDA	90.38	BAIK	90.38	BAIK
10	BRIDA	111.80	ISTIMEWA	96.12	BAIK
11	ESDM	125.76	ISTIMEWA	94.16	BAIK
12	DISLUTKAN	102.54	ISTIMEWA	102.54	ISTIMEWA
13	DKP	97.11	BAIK	94.43	BAIK

NO	NAMA OPD	RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD TAHUN 2025	PREDIKAT KINERJA	HASIL PENILAIAN KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024	
				NILAI CAPAIAN	PREDIKAT KINERJA
14	DISKOMINFO	104.80	ISTIMEWA	102.86	ISTIMEWA
15	DISKOP	132.37	ISTIMEWA	87.87	BAIK
16	DLHK	853.47	ISTIMEWA	87.45	BAIK
17	DISPAR	119.34	ISTIMEWA	104.20	ISTIMEWA
18	PUPR	99.38	BAIK	89.44	BAIK
19	DPMPDes	109.45	ISTIMEWA	105.17	ISTIMEWA
20	DP3AP2KB	91.23	BAIK	82.10	BAIK
21	DISPORA	109.89	ISTIMEWA	86.09	BAIK
22	DPMPTSP	97.12	BAIK	87.41	BAIK
23	DISDAG	10,372.47	ISTIMEWA	105.04	ISTIMEWA
24	DISHUB	101.63	ISTIMEWA	101.63	ISTIMEWA
25	DISPERIN	196.97	ISTIMEWA	95.50	BAIK
26	DISPERPUS	98.39	BAIK	98.39	BAIK
27	DISTANBUN	347.31	ISTIMEWA	106.93	ISTIMEWA
28	PERKIM	100.02	ISTIMEWA	100.02	ISTIMEWA
29	DISNAKESWAN	103.40	ISTIMEWA	93.06	BAIK
30	DINSOS	105.21	ISTIMEWA	84.07	BAIK
31	DISNAKER	217.42	ISTIMEWA	104.46	ISTIMEWA
32	INSPEKTORAT	87.78	BAIK	87.78	BAIK
33	BKD	94.55	BAIK	85.09	BAIK
34	SATPOLPP	103.94	ISTIMEWA	103.55	ISTIMEWA
35	SETDA	95.10	BAIK	84.38	BAIK
36	SETWAN	100.00	BAIK	90.00	BAIK

Sumber : data diolah, 2026

Adapun rincian dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO			KETERANGAN CAPAIAN	
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD		NILAI AKHIR CAPAIAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
1	Meningkatnya akseibilitas layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	APK SMA/SMK/MA/Paket C		116.33	100	115.9	115.90	110.00	10	99.00	Melampaui target
		APM SMA/SMK/MA/Paket C		98.65	98.7	98.72	100.02	100.02	10	90.02	Melampaui target
		APS		99.24	99.3	99.37	100.07	100.07	10	90.06	Melampaui target
		APS – SLB		92.48	92.5	92.51	100.01	100.01	10	90.01	Melampaui target
2	Meningkatnya mutu Pendidikan	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah Minimal B		66.53	66.85	64.88	97.05	97.05	10	87.35	Belum memenuhi target
		Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B		55.81	56.25	52.00	92.44	92.44	10	83.20	Belum memenuhi target
		Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan		54	54.33	57.33	105.52	105.52	10	94.97	Melampaui target
		Persentase lulusan SMK yang terserap		55	55.15	64.04	116.12	110.00	10	99.00	Melampaui target
3	Meningkatnya pemenuhan SPM Pendidikan	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan menengah		Na	89.29	99.69	111.65	110.00	10	99.00	Melampaui target
		Persentase pemenuhan SPM Pendidikan khusus		Na	84.62	99.99	118.16	110.00	10	99.00	Melampaui target
4	Meningkatnya pengembangan obyek pemajuan kebudayaan (OPK)	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)		83.33	91.67	91.67	100.00	100.00	10	90.00	sesuai target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							105.18			92.87	
Predikat AKIP OPD			Kategori		BB						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA	BAIK			
2	DINAS KESEHATAN										
1	Meningkatkan masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	257 (SP 2020)	184.00	257	43.19				Belum Tersedia Datanya

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG				KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	PKO		
									KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
	layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan terjangkau:	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	29.37 (SP 2020)	22.84	29.37	71.41	100	100		Belum Tersedia Datanya
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%		36	26.01	72.25	72.25	10	65.03	Belum memenuhi target
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	%	NA	10	70	700.00	110.00	10	99.00	Melampaui target
		Angka Populasi Bebas Penyakit menular	%	NA	50	NA	NA				Belum Tersedia Datanya
		Cakupan Faskes dengan Nilai Tingkat Kepuasan pasien Terhadap Layanan dengan kriteria sangat baik	%		40	NA	NA				Belum Tersedia Datanya
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio per 1000 pddk	4.2	5.5	4.1	74.55	74.55	10	67.09	Belum memenuhi target
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup	%	58.3	60.70	58.30	96.05	96.05	10	86.44	Belum memenuhi target
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin		80.57	79.80	99.04	99.04	10	89.14	Belum memenuhi target
		Persentase Balita Wasting	%		8	5.93	125.88	110.00	10	99.00	Melampaui target
		Persentase Balita underweight	%		15	14.64	102.40	102.40	10	92.16	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					181.45				85.41		
Predikat AKIP OPD		Kategori		BB							
PREDIKAT CAPAIAN OPD					ISTIMEWA				BAIK		
3	KESBANGPOL										
1	Meningkatnya kualitas demokrasi melalui kebebasan sipil, hak politik, dan kesetaraan gender	Skor Indikator terpilih aspek Kebebasan & Kesetaraan (IDI, indikator agregat operasional)	Skor	77.33	78.88	77.33	98.03	98.03	10	88.23	Belum memenuhi target
2	Meningkatnya kondusivitas daerah melalui penanganan kasus konflik sosial	Persentase Kasus Konflik Sosial yang ditangani	% (kasus)		81	81	100	100.00	10	90.00	Sesuai target

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO				KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							99.02	89.12			
Predikat AKIP OPD			Kategori		BB						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK	BAIK			
4	BPBD										
1	Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan berketahanan bencana multipihak (Destana)	%	52.74	64.75	58.49	90.33	90.33	10	81.30	Belum memenuhi target
		Persentase Ketangguhan Pra-Bencana	%	55.00	60.75	56.40	92.84	92.84	10	83.56	Belum memenuhi target
		Persentase Ketangguhan Saat/Darurat Bencana	%	51.00	53.55	48.70	90.94	90.94	10	81.85	Belum memenuhi target
		Persentase Ketangguhan Pasca bencana	%	52.00	54.60	51.40	94.14	94.14	10	84.73	Belum memenuhi target
2	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Kabupaten/Kota	Persentase Rata – Rata Nilai Capaian SPM Sub-urusan Kebakaran Kabupaten/Kota	%	96.55	100.00	95.60	95.60	95.60	10	86.04	Belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							92.77	83.49			
Predikat AKIP OPD			Kategori		BB						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK	BAIK			
5	BPKAD										
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	%	100	100	100	100	100.00	0	100.00	Sesuai target
		Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi APBD	%	100	100	100	100	100.00	0	100.00	Sesuai target
		Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	%	100	100	100	100	100.00	0	100.00	Sesuai target
		Persentase tingkat kepatuhan terhadap belanja wajib	%	100	100	100	100	100.00	0	100.00	Sesuai target

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEIGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG				KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	PKO KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	1.99	2.07	2.21	106.76	106.76	0	106.76	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							101.35	101.35			
Predikat AKIP OPD					Kategori		A				
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA		ISTIMEWA		
6	BAPPENDA										
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Milyar Rp	3,289.10	2,809.27	2,755.04	98.07	98.07	0	98.07	Belum memenuhi target
2	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil	Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)	Milyar Rp	488.43	801.9	791.82	98.74	98.74	0	98.74	Belum memenuhi target
3	Meningkatkan Kualitas pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85.72	87.63	84.42	96.34	96.34	0	96.34	Belum memenuhi target
		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (PKB)	%	54.12	55.19	62.93	114.02	110.00	0	110.00	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							101.79	100.79			
Predikat AKIP OPD					Kategori		A				
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA		ISTIMEWA		
7	BPSDM										
1	Meningkatnya Sistem Merit Melalui Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Sistem Merit unsur Pengembangan Kompetensi	Nilai	23	25.5	23	90.20	90.20	10	81.18	Belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							90.20	81.18			
Predikat AKIP OPD					Kategori		BB				
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK		BAIK		
8	PENGHUBUNG										
1	Meningkatnya peran strategis Badan Penghubung dalam fasilitasi pimpinan, koordinasi, promosi daerah, dan kontribusi peningkatan PAD melalui pemanfaatan Wisma NTB	Nilai Service Performance Index (SPI) Fasilitasi Pimpinan	Nilai	95.23	95.75	96.03	100.29	100.29	10	90.26	Melampaui target
		Persentase kegiatan koordinasi pusat-daerah yang difasilitasi	%	N/A	95.75	93	97.13	97.13	10	87.42	Belum memenuhi target
		Persentase promosi daerah yang dilaksanakan dan/atau difasilitasi	%	93.33	95.75	100	104.44	104.44	10	93.99	Melampaui target

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO				KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
		Persentase keterisian kamar di Wisma NTB			8.5	8.7	102.35	102.35	10	92.12	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							101.05			90.95	
Predikat AKIP OPD			Kategori			BB					
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA			BAIK	
9	BAPPEDA										
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah	Indeks	Sangat Baik (91,47)	91,5 (Sangat Baik)	91.47	87.39	87.39	0	87.39	Belum memenuhi target
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	nilai	25.21	25.45	24.16	94.93	94.93	0	94.93	Belum memenuhi target
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Komponen pengukuran Kinerja	nilai	21.48	21.93	19.48	88.83	88.83	0	88.83	Belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							90.38			90.38	
Predikat AKIP OPD			Kategori			A					
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK			BAIK	
10	BRIDA										
1	Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Peresentase kebijakan berbasis bukti	%	NA	50	60	120.00	110.00	10	99.00	Melampaui target
		Persentase inovasi yang diterapkan dalam pembangunan daerah	%		96.53	100	103.59	103.59	10	93.24	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							111.80			96.12	
Predikat AKIP OPD			Kategori			BB					
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA			BAIK	
Dinas ESDM											
1	Meningkatnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi primer.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer.	%	23.25	23.50	25,07	106.68	106.68	0	106.68	Melampaui target
2	Meningkatnya status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Persentase peningkatan status IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.	%	-	6.41	15.15	236.37	110.00	0	110.00	Melampaui target
3	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan	Rasio Elektrifikasi.	%	99.99	100	99.99	99.99	99.99	0	99.99	belum memenuhi target

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO				KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
	ramah lingkungan bagi masyarakat.										
4	Meningkatnya status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Persentase pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai aturan	%	-	10.53	6.32	59.98	59.98	0	59.98	belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							125.76	94.16			
Predikat AKIP OPD			Kategori	A							
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA	BAIK			
12	DISLUTKAN										
1	Meningkatnya produksi perikanan & kes. masyarakat perikanan	Produksi Perikanan	Ton	1,216,746.40	1.231.955	1.252.720	101.69	101.69	0	101.69	Melampaui target
		Nilai Tukar Perikanan (NTP)	Persen	105.59	101	106.82	105.76	105.76	0	105.76	Melampaui target
2	Meningkatnya Luasan Ekosistem Perairan Laut Yang Berstatus Baik	Luas Ekosistem Perairan Laut Yang Berstatus Baik	Ha	14,493	14.503	14.528	100.17	100.17	0	100.17	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							102.54	102.54			
Predikat AKIP OPD			Kategori	A							
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA	ISTIMEWA			
13	DKP										
1	Terwujudnya Ketersediaan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	92.08	90	87.84	97.60	97.60	0	97.60	Belum memenuhi target
2	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	Persen	2.74	1.98	2.67	65.02	65.02	0	65.02	Belum memenuhi target
3	Terwujudnya Stabilitas Pasokan dan Harga Komoditas Pangan	Inflasi Pangan Bergejolak $\pm$ 1 dari target yang ditetapkan	Persen	0.63	5.00	3.83	123.40	110.00	0	110.00	Melampaui target
4	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	93.27	96.80	95.30	98.45	98.45	0	98.45	Belum memenuhi target
5	Meningkatnya Kemanan dan Mutu Pangan Segar	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	Persen	74.40	75.20	76.00	101.06	101.06	0	101.06	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							97.11	94.43			
Predikat AKIP OPD			Kategori	A							
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK	BAIK			

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025			FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO			KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
14	DISKOMINFO										
6	Meningkatnya Kualitas Transformasi Layanan Pemerintah Daerah berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE)	Skor	3.56	3.59	4.20	116.99	110.00	0	110.00	Melampaui target
		Indeks Keamanan Informasi	Skor	437	456	505	110.75	110.00	0	110.00	Melampaui target
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	81.71	81.75	74.76	91.45	91.45	0	91.45	Belum memenuhi target
		Indeks Pembangunan Statistik	Skor	2.77	2.77	2.77	100.00	100.00	0	100.00	sesuai target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							104.80			102.86	
Predikat AKIP OPD					Kategori			A			
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA		ISTIMEWA		
15	DISKOP										
1	Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level Provinsi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level Provinsi	%	NA	0,19	0.41	214.21	110.00	10	99.00	Melampaui target
2	Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Proporsi Jumlah UKM	%	NA	2,15	2.17	100.93	100.93	10	90.84	Melampaui target
3	Meningkatnya Volume usaha Koperasi Terhadap PDRB	Pertumbuhan Volume usaha Koperasi	%	NA	5.05	4.14	81.98	81.98	10	73.78	Belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							132.37			87.87	
Predikat AKIP OPD					Kategori			BB			
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA		BAIK		
16	DLHK										
1	Menurunnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	poin		74.36	71.24	95.80	95.80	0	95.80	Belum memenuhi target
		Indeks Kualitas Air Laut	poin		82.99	81.14	97.77	97.77	0	97.77	Belum memenuhi target
		Indeks Kualitas Udara	poin		75.62	81.44	107.70	107.70	0	107.70	Melampaui target
		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah	%		8.83	0.04	0.45	0.45	0	0.45	Belum memenuhi target

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO			KETERANGAN CAPAIAN	
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD		NILAI AKHIR CAPAIAN
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lestari	Indeks Kualitas Lahan	poin		77.63	77.36	99.65	99.65	0	99.65	Belum memenuhi target
		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan	%		50.27	NA					Belum tersedia datanya
		Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan	poin		3.264	3.29	100.80	100.80	0	100.80	Melampaui target
3	Meningkatnya Produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	%		4.2	229.83	5.472,14	110.00	0	110.00	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							853.47			87.45	
Predikat AKIP OPD			Kategori			A					
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA			BAIK	
17	DISPAR										
1	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1.75	2.03	1.88	92.61	92.61	0	92.61	Belum memenuhi target
		Jaumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349.920	382.813	509.171	133.01	110.00	0	110.00	Melampaui target
		Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%	3.72	3.27	4.33	132.42	110.00	0	110.00	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							119.34			104.20	
Predikat AKIP OPD			Kategori			A					
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA			ISTIMEWA	
18	PUPR										
1	Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur	Persentase Kemantapan Infrastruktur	%	57.73	58.14	57.80	99.42	99.42	10	89.47	Belum memenuhi target
		Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	%	62.93	65.53	65.59	100.09	100.09	10	90.08	Melampaui target
		Persentase Akses Layanan Air Minum	%	84.41	85.41	84.41	98.83	98.83	10	88.95	Belum memenuhi target
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian	%	5.56	5.56	5.56	100.00	100.00	10	90.00	Melampaui target

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025			FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO			KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
		Dengan Akses Sanitasi (Sanitasi Aman)									
		Tingkat kemantapan jalan provinsi	%	75.54	76.04	75.54	99.34	99.34	10	89.41	Belum memenuhi target
2	Meningkatnya Kinerja Aspek Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan (TURBINLAKWAS) dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	62.17	63.05	62.17	98.60	98.60	10	88.74	Belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							99.38			89.44	
Predikat AKIP OPD					Kategori			BB			
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK			BAIK	
19	DPMPDes										
1	Meningkatnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Administrasi Kependudukan	%	81.76	82.16	82.44	100.34	100.34	0	100.34	Memenuhi target
2	Meningkatnya Perkembangan Status Desa	Persentase Desa Mandiri	%	37.61	41.14	48.78	118.56	110.00	0	110.00	Memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							109.45			105.17	
Predikat AKIP OPD					Kategori			A			
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA			ISTIMEWA	
20	DP3AP2KB										
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20)	%	0.319	0.317	0.319	100.63	100.63	10	90.57	Memenuhi target
		Pengeluaran per Kapita Perempuan	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	10,011	10,245	10,011	97.72	97.72	10	87.94	Belum memenuhi target
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61.06	61.14	66.51	108.78	108.78	10	97.90	Memenuhi target
2	Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	%	1.6	1.593	1.58	100.82	100.82	10	90.73	Memenuhi target

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025			FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO			KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	NA	20.44	9.85	48.19	48.19	10	43.37	Belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							91.23			82.10	
Predikat AKIP OPD					Kategori			BB			
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK			BAIK	
21	DISPORA										
1	Meningkatnya kemandirian pemuda dan prestasi pemuda yang dibina	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	%	NA	0.35	NA					Belum tersedia datanya
		Persentase pemuda yang berprestasi di Tingkat nasional dan internasional	%	6.97	7.44	6.05	81.32	81.32	10	73.19	Belum memenuhi target
2	Meningkatnya prestasi bagi atlet yang dibina di tingkat nasional dan internasional	Persentase atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional	%	26	26	36	138.46	110.00	10	99.00	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							109.89			86.09	
Predikat AKIP OPD					Kategori			BB			
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA			BAIK	
22	DPMPTSP										
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMDN	Triliun	43.76	49.01	51.10	104.26	104.26	10	93.84	Melampaui target
		Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun	10.79	12.08	9.99	82.70	82.70	10	74.43	Belum memenuhi target
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Berusaha	Nilai	A (90,07)	A (91)	A (95,01)	104.41	104.41	10	93.97	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							97.12			87.41	
Predikat AKIP OPD					Kategori			BB			
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK			BAIK	
23	DISDAG										
1	Meningkatnya Kinerja Ekspor Non Tambang	Persentase Peningkatan Ekspor Non Tambang	Persen	-4.34	7.00	2,163.86	30,912.29	110.00	0	110.00	Melampaui target
2	Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah	Persen	Na	8.00	NA					Belum tersedia datanya

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO				KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
3	Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Poin	60,37	61	64,13	105.13	105.13	0	105.13	Melampaui target
4	Meningkatnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Inflasi pangan	Persen	0.63	2-4	3,90	100.00	100.00	0	100.00	Sesuai target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							10,372.47	105.04			
Predikat AKIP OPD			Kategori		A						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA	ISTIMEWA			
24	DISHUB										
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0.57	0.58	0.59	101.72	101.72	0	101.72	Melampaui target
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Transportasi	Rasio	1.35	1.30	1.28	101.54	101.54	0	101.54	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							101.63	101.63			
Predikat AKIP OPD			Kategori		A						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA	ISTIMEWA			
25	DISPERIN										
1	Meningkatnya Produktivitas Industri Pengolahan Sub Sektor Agro Maritim	Persentase Peningkatan Pertumbuhan PDRB Industri Makanan dan Minuman	%	3.01	3.51	12.33	351.28	110.00	0	110.00	Melampaui target
		Persentase Peningkatan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Tembakau	%	1.93	2.43	6.27	258.02	110.00	0	110.00	Melampaui target
		Persentase Peningkatan Pertumbuhan PDRB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	%	3.63	4.13	5.16	124.94	110.00	0	110.00	Melampaui target
		Persentase Peningkatan Pertumbuhan PDRB Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	%	3.71	4.21	2.19	52.02	52.02	0	52.02	Belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							196.57	95.50			
Predikat AKIP OPD			Kategori		A						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA	BAIK			

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO				KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
26	DISPERPUS										
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat Nusa Tenggara Barat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	60.42	61	60.42	99.05	99.05	0	99.05	Belum memenuhi target
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah yang Sesuai NSPK Kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70.08	70.50	68.90	97.73	97.73	0	97.73	Belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							98.39		98.39		
Predikat AKIP OPD			Kategori		A						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK		BAIK		
27	DISTANBUN										
1	Meningkatnya Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) dan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Persen	-6.16	0,60	5.57	928.33	110.00	0	110.00	Belum memenuhi target
		NTP Tanaman Pangan	Indeks	120.98	105	125.53	119.55	110.00	0	110.00	Melampaui target
		NTP Hortikultura	Indeks	180.47	105	255.85	243.67	110.00	0	110.00	Melampaui target
		NTP Perkebunan	Indeks	108.41	105	102.59	97.70	97.70	0	97.70	Belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							347.31		106.93		
Predikat AKIP OPD			Kategori		A						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA		ISTIMEWA		
28	PERKIM										
1	Meningkatnya akses rumah layak huni dan kualitas infrastruktur dasar permukiman yang aman, sehat dan nyaman	Persentase Kawasan permukiman yang berkualitas	%	99.62	99.65	99.69	100.04	100.04	0	100.04	Melampaui target
2	Meningkatnya pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat	Persentase Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat	%	100	100	100	100.00	100.00	0	100.00	Sesuai target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100.02		100.02		
Predikat AKIP OPD			Kategori		A						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA		ISTIMEWA		

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO				KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
29	DISNAKESWAN										
1	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Produksi Daging	Ton	75,194.85	68,249.79	73,364.49	107.49	107.49	10	96.74	Melampaui target
		Produksi Telur	Ton	57,506.44	55,171.25	56,434.86	102.29	102.29	10	92.06	Melampaui target
2	Meningkatnya Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	100	100	100	100.00	100.00	10	90.00	Melampaui target
3	Meningkatkan Tata Niaga Sub Sektor Peternakan	Persentase Produk Peternakan yang Dipasarkan	Persen	71.28	75	77.85	103.80	103.80	10	93.42	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							103.40		93.06		
Predikat AKIP OPD			Kategori		BB						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA		BAIK		
30	DINSOS										
1	Meningkatnya fungsi sosial masyarakat rentan	Indeks Peranan Sosial	Indeks	N/A	47	29.44	62.64	62.64	10	56.37	Belum memenuhi target
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat Rentan	Indeks Kebutuhan Dasar	Indeks	N/A	55	55.56	101.02	101.02	10	90.92	Melampaui target
3	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Rentan	Indeks Keberdayaan Ekonomi	Indeks	N/A	38	59.73	157.18	110.00	10	99.00	Melampaui target
4	Meningkatnya Capaian SPM Bidang Sosial	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	Persentase	99.22	100	100	100.00	100.00	10	90.00	Sesuai target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							105.21		84.07		
Predikat AKIP OPD			Kategori		BB						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA		BAIK		
31	DISNAKER										
1	Meningkatnya kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja	Proporsi Penciptaan lapangan Kerja Formal (proxi: persentase tenaga kerja sektor formal)	%	29.49	29.00	31.58	108.90	108.90	0	108.90	Melampaui target
		TPAK Perempuan	%	68.04	70.34	65.69	93.39	93.39	0	93.39	Belum memenuhi target
		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	37.16	28.65	38.81	135.46	110.00	0	110.00	Melampaui target

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO				KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
2	Meningkatnya kemandirian desa di kawasan transmigrasi	Persentase desa Maju dan mandiri di 4 kawasan transmigrasi	%	76.27	81.36	81.36	100.00	100.00	0	100.00	Sesuai target
		Persentase peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat di kawasan transmigrasi	%	NA	1.10	7.14	649.35	110.00	0	110.00	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							217.42		104.46		
Predikat AKIP OPD			Kategori		A						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA		ISTIMEWA		
32	INSPEKTORAT										
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan APIP	Level (Nilai) Kapabilitas APIP	Level (Nilai)	3.00	3.00	2.20	73.33	73.33	0	73.33	Belum memenuhi target
2	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Dimensi Evaluasi	Nilai Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi	Nilai	95	96	98.13	102.22	102.22	0	102.22	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							87.78		87.78		
Predikat AKIP OPD			Kategori		A						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK		BAIK		
33	BKD										
1	Meningkatnya Profesionalitas dan Integritas ASN melalui Tata Kelola Manajemen ASN yang Berkualitas	Nilai Indeks NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN	Nilai	78.4	82.92	78.40	94.55	94.55	10	85.09	Belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							94.55		85.09		
Predikat AKIP OPD			Kategori		BB						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK		BAIK		
34	SATPOLPP										
1	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah dan Rasa Aman Masyarakat Dalam Beraktivitas Di Lingkungan Tempat Tinggalnya	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	27.03	70.00	70.45	100.65	100.65	0	100.65	Melampaui target
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	70.22	72.00	82.89	115.13	110.00	0	110.00	Melampaui target
2	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Dasar SPM Trantibum		Indeks	100	100	100	100.00	100.00	0	100.00	Sesuai target

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO			KETERANGAN CAPAIAN	
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD		NILAI AKHIR CAPAIAN
		Indeks Pencapaian SPM Trantibum	Kategori	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							105.26		103.55		
		Predikat AKIP OPD	Kategori			A					
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA		ISTIMEWA		
35	SETDA	CAPAIAN IKU SEKDA									
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Keuangan dan Investasi Daerah	Return Of Asset (ROA)	%	NA	1.91	0.41	21.47	21.47	10	19.32	Belum memenuhi target
2	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General	skor	91	91.50	91.00	99.45	99.45	10	89.51	Belum memenuhi target
		Indeks Kematangan Organisasi	poin	NA	37.10	42.90	115.63	110.00	10	99.00	melampaui target
		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai	11.24	11.63	11.39	97.94	97.94	10	88.14	Belum memenuhi target
		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	0	65.00	45.79	70.45	70.45	10	63.40	Belum memenuhi target
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77.74	79.29	96.54	121.76	110.00	10	99.00	melampaui target
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	82.36	82.50	86.06	104.32	104.32	10	93.88	melampaui target
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.42	4.03	4.41	109.43	109.43	10	98.49	melampaui target
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		%	85.82	84.30	88.03	104.42	104.42	10	93.98
		Indeks BerAKHLAK	Indeks	57.29	57.50	57.30	99.65	99.65	10	89.69	Belum memenuhi target
3	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	40	78.50	79.26	100.97	100.97	10	90.87	melampaui target
		Pengendalian Inflasi	%	1.28	3,0-3,7	3.01	100.00	100.00	10	90.00	sesuai target

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG				KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	PKO		
									KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
4	Meningkatnya Aksi HAM di Daerah melalui pemenuhan data dukung	Persentase Peningkatan Aksi HAM di Daerah melalui pemenuhan data dukung	%	NA	65.00	59.00	90.77	90.77	10	81.69	Belum memenuhi target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							95.10		84.38		
Predikat AKIP OPD			Kategori		BB						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK		BAIK		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA											
CAPAIAN IKU KARO UMUM											
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Umum	Indeks Kepuasan Stakeholder atas Layanan Biro Umum	Skor/Indeks	-	89,31 (Sangat Baik)	91,18 (Sangat baik)	102.09				Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							102.09				
CAPAIAN IKU KARO PBJ											
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin		82.50	86.06	104.32	104.32	10	93.88	Melampaui target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							104.32		93.88		
Predikat AKIP OPD			Kategori		BB						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							ISTIMEWA		BAIK		
CAPAIAN IKU KARO HUKUM											
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor		76.82	78.40	102.06	102.06	10	91.85	melampaui target
2	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas	Persen		100	100	100.00	100.00	10	90.00	Sesuai target
3	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas	Persen		100	100	100.00	100.00	10	90.00	Sesuai target
		Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas	Persen		100	100	100.00	100.00	10	90.00	Sesuai target
		Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Litigasi	Persen		100	100	100.00	100.00	10	90.00	Sesuai target
		Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Non Litigasi dan HAM melalui Mediasi	Persen		100	50	50.00	50.00	10	45.00	Belum memenuhi target

NO	NAMA OPD/ SASARAN STRTAEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025			FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024 TTG PKO			KETERANGAN CAPAIAN
					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NORMALISASI TINGKAT CAPAIAN	KOREKSI CAPAIAN BERDASARKAN PREDIKAT AKIP OPD	NILAI AKHIR CAPAIAN	
		Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas	Persen		100	100	100.00	100.00	10	90.00	Sesuai target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							93.15	83.84			
Predikat AKIP OPD			Kategori		BB						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK	BAIK			
36	SETWAN										
1	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100.00	10	90.00	Sesuai target
		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100.00	10	90.00	Sesuai target
2	Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100.00	10	90.00	Sesuai target
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100	90			
Predikat AKIP OPD			Kategori		BB						
PREDIKAT CAPAIAN OPD							BAIK	BAIK			

Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Mengatasi Pencapaian Target Kinerja

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA MENGATASI
1. Optimalnya kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan		1. Meningkatkan Kompetensi SDM RS; Meningkatkan ketersediaan Subspesialis sesuai kebutuhan pengembangan layanan. 2. Pembuatan aplikasi/sistem secara online untuk mengatur waktu pelayanan pasien berdasarkan nomor antrian (Sistem Informasi Manajemen-Rumah Sakit) 3. Pemberian informasi tentang produk layanan dan waktu tunggu di tiap unit layanan dilakukan dengan konsisten.
2. Kualitas SDM, Kuantitas Layanan, Peningkatan Jumlah Sarpras		
3. Dukungan dari Pimpinan dan Kolaborasi dengan NGO terkait ketercapaian Sasaran	Kurang siapnya kab/kota dalam melakukan penilaian capaian IKD dan lebih ketatnya evaluasi dari BNPB terkait data dukung dalam penilaian IKD	Membentuk Tim Binwas dan Evaluasi IKD Kab/Kota tingkat Provinsi
4. Pendorong keberhasilan pada indikator Persentase ketepatan waktu penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD yaitu: - Komitmen dan koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tahapan dan jadwal penganggaran. - Kesiapan dan konsistensi dokumen perencanaan serta penganggaran menjadi faktor pendukung utama dalam memastikan penetapan APBD dan Perubahan APBD dapat dilakukan tepat waktu.	Penghambat pencapaian pada indikator Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap belanja Wajib yaitu, - Penetapan dokumen RKPD yang tidak tepat waktu menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian kinerja. - Persentase belanja pegawai masih tinggi akibat penambahan jumlah aparatur melalui penerimaan PPPK dan CPNS.	Upaya yang telah dilakukan pada indikator Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap belanja Wajib yaitu, - Melakukan koordinasi dengan Bappeda sebagai leading sektor perencanaan dalam penyusunan RKPD. - Menyusun dan menetapkan alokasi belanja yang selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan serta didukung oleh kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pimpinan.
5. Pendorong keberhasilan pada indikator Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi APBD yaitu: - Komitmen dari Pimpinan (Kepala Daerah dan DPRD) dalam menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten - Koordinasi dan komunikasi yang intens antara Tim Evaluator dengan Pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi	- Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebagai dampak penerapan kebijakan opsen PKB serta berkurangnya kontribusi beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.	
6. Pendorong keberhasilan pada indikator Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD yaitu, - Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam		

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA MENGATASI
menjalankan penyusunan LKPD sesuai jadwal. - Koordinasi antarunit kerja yang efektif dalam penyediaan data dan dokumen pendukung. - Dukungan SDM yang kompeten serta sistem akuntansi keuangan daerah yang berfungsi dengan baik.		
7. Penyusunan Pergub NTB Nomor 12 Tahun 2025 tentang NTB Corporate University sebagai strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	1. Dengan dikeluarkan surat BKN Nomor: 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025, Tanggal 24 Oktober Tahun 2025, yang menyatakan Badan Kepegawaian Negara sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, di mana indikator kinerja utama Kepala BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 adalah Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi, mengakibatkan sasaran dan indikator tersebut harus dirubah pada bulan November Tahun 2025, sehingga mempengaruhi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2025 2. Belum tersusunnya perencanaan data pengembangan kompetensi yang disebut dengan HCDP (Human Capital Development Plant) yang seharusnya menjadi dasar pemetaan kompetensi ASN Tahun Renstra 2025-2029.'-	Melakukan perubahan terbaru terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Renstra sesuai dengan turunan dari RPJMD Provinsi yaitu Reformasi Birokrasi General NTB yaitu Indeks Sistem Merit unsur Pengembangan Kompetensi. Mulai melakukan pemetaan dan perencanaan untuk penyusunan HCDP (Humant Capital Development Plant)
8. Kesigapan dan efektivitas pelayanan hospitality di Wisma NTB dinilai telah berjalan dengan baik dan cukup mumpuni, sehingga mampu memenuhi standar pelayanan penginapan yang layak. Petugas secara umum responsif dalam melayani kebutuhan tamu, menjaga sikap ramah dan profesional	Regulasi Peraturan Gubernur NTB no 24 th 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas menyebutkan diwajibkan untuk menggunakan fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta akan tetapi didalam Pergub NTB No 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 81 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas menyebutkan Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN dapat menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta.	Mendorong usulan perubahan Pergub tentang perjalanan dinas, agar dapat meningkatkan okupansi produktif dalam pemanfaatan Wisma NTB sebagai aset daerah yang memberikan kontribusi terhadap PAD. -Melakukan Koordinasi intensif terkait tugas dan kewenangan dalam proses pemulangan warga NTB terlantar dengan Instansi-instansi terkait.
9. Semangat masyarakat diaspora Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan pertemuan dan pembinaan menjadi pendorong keberhasilan kegiatan kelembagaan. Antusiasme ini tercermin dalam tingkat kehadiran, keterlibatan dalam diskusi serta dukungan terhadap setiap agenda yang dilaksanakan, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan dan efektifitas kegiatan kelembagaan	Dari sisi pelayanan masyarakat terlantar sejauh ini dilaksanakan tanpa ada anggaran yang teralokasi khusus. Selain itu keterbatasan anggaran di APBD Murni belum bisa mewujudkan pertemuan Diaspora yang diselenggarakan langsung Badan Penghubung Daerah	Melakukan koordinasi intensif terkait tugas dan kewenangan dalam proses pengulangan warga NTB terlantar dengan instansi-instansi terkait melakukan penganggaran pada APBD perubahan untuk pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan diaspora dalam rangka menyambut HUT NTB memberikan euphoria masyarakat NTB di Jakarta dalam mencintai tanah /asal kelahiran
10. Dukungan anggaran pada APBD Perubahan cukup untuk beberapa perbaikan kondisi Anjungan NTB. Selain itu dukungan eksistensi	Kondisi Anjungan NTB di TMII yang memprihatinkan dengan bangunan tua yang tidak sesuai regulasi pengelola TMII dan fasilitas yang belum memadai.	Kreatifitas dan inovasi pelayanan Badan Penghubung NTB di Jakarta. Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA MENGATASI
pecinta budaya Nusa Tenggara Barat di Jakarta memberikan komitmen untuk melestarikan kesenian dan budaya NTB di Jakarta	Selain itu, regulasi TMII mengharuskan setiap Anjungan memenuhi standar tradisi lokal dan mendukung program zero emission, menambah kompleksitas tantangan.	Jakarta telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi pelayanannya. Salah satu langkah yang diambil adalah Pembentukan Diklat Kesenian dan Budaya Nusa Tenggara Barat di Anjungan NTB. Selain itu perbaikan sarana dan prasarana juga ditingkatkan mulai dari perbaikan berugak, panggung serta peremajaan warna atap genteng juga dilaksanakan di tahun 2025.
11. Peningkatan capaian porsi EBT dalam bauran energi primer didukung oleh beroperasinya pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dan peningkatan konsumsi bahan bakar biodisel dari B30 ke B40.	Target capaian 100% rasio elektrifikasi yang saat ini belum tercapai dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang bersifat dinamis, pola persebaran penduduk secara geografis dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.	Koordinasi dengan BPS, Dinas Sosial, Bappeda dan PT. PLN terkait pemutakhiran data rumah tangga belum berlistrik
12. Meningkatnya capaian status IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi didukung oleh kepatuhan perusahaan terhadap aspek teknis, lingkungan, administratif dan finansial dalam proses peningkatan status kegiatan pertambangan.	Target capaian pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dipengaruhi oleh faktor regulasi, teknis, kelembagaan dan kepatuhan. Peralihan kewenangan perizinan pemanfaatan air tanah ke Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.	Koordinasi dengan Kementerian ESDM dalam hal ini Badan Geologi untuk pemutakhiran data pemegang izin pemanfaatan air tanah dalam wilayah provinsi. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku pemanfaatan air tanah dalam wilayah provinsi.
13. Pendataan UKM yang semakin tersruktur melalui sistem Informasi Data Terpadu (SIDT) per 31 Oktober 2025. sehingga UKM Non Pertanian dapat Teridentifikasi dengan lebih baik.	Struktur UMKM yang masih didominasi usaha mikro sehingga Jumlah usaha yang naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah relatif terbatas.	Pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan UKM Non Pertanian untuk mendorong peningkatan skala usaha.
14. Dukungan program pembinaan dan Fasilitasi UKM dari Pemerintah Provinsi NTB yang mendorong keberlangsungan dan legalitas usaha kecil dan menengah di sektor non pertanian	Keterbatasan permodalan dan akses pembiayaan yang menghambat pengembangan skala usaha	Fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan dengan perbankan dan lembaga keuangan.
15. Pertumbuhan Sektor Perdagangan, jasa dan Industri Pengolahan yang menjadi tulang punggung UKM Non Pertanian di wilayah perkotaan dan Kawasan Pariwisata	Belum Optimalnya legalitas dan Formasi Usaha menyebabkan sebagian pelaku usaha non pertanian belum tercatat sebagai UKM	Pemutakhiran data UKM secara berkala melalui SIDT sebagai dasar perencanaan kebijakan.
16. Adanya Tambahan Usaha kecil dan Menengah yang bergerak disektor NON Pertanian Usaha Kecil Sebanyak 1100 Unit dan Usaha Menengah 222 Unit		
17. Inklusi UKM sektor pertanian (sebanyak 87 unit) ke dalam perhitungan indikator, sehingga memperluas basis UKM yang dihitung.	Besarnya jumlah total UMKM seluruh skala di Provinsi NTB (649.494 unit) menyebabkan proporsi UKM secara persentase masih relatif kecil.	Pembinaan terintegrasi lintas sektor, khususnya antara sektor pertanian dan non pertanian.
18. Sinergi lintas sektor dalam pengembangan UKM, baik sektor pertanian maupun non pertanian.	Rendahnya laju transformasi usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah, terutama di sektor tradisional.	Program peningkatan produktivitas dan daya saing UKM, termasuk pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengemasan produk.
19. Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program peningkatan kapasitas usaha.	1. Keterbatasan adopsi teknologi dan inovasi usaha pada sebagian besar pelaku UMKM.	Pendataan dan klasifikasi usaha secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan UMKM menuju UKM.
	2. Tidak Dilakukan Pemutakhiran data Pada Tahun 2024 sehingga terjadi Lonjakan Jumlah data pada tahun 2025 dari 324.624 menjadi 649.494	Mendorong Pembentukan Usaha Mikro Baru sebanyak Dari 648.103 unit menjadi 648.152 Unit Usaha atau bertambah sebanyak 648.152 Unit.

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA MENGATASI
	3. Tidak ada penambahan Usaha Mikro yang Naik Kelas ke usaha Kecil dan Menengah Karena Harus memiliki Omset Rp. 2.000.000.000,- dan Rp. 15.000.000.000,-	
20. Pelaksanaan bimtek dan workshop kewirausahaan yang menghasilkan 740 wirausaha baru sepanjang tahun 2025.	Keterbatasan keberlanjutan usaha pasca pelatihan, di mana tidak semua peserta mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya.	Penyelenggaraan pelatihan dan workshop kewirausahaan secara berkelanjutan.
21. Meningkatnya minat masyarakat terhadap kewirausahaan, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif.	Akses pasar dan permodalan yang belum merata, khususnya bagi wirausaha pemula.	Pendampingan usaha pasca pelatihan untuk meningkatkan keberlangsungan wirausaha baru.
22. Dukungan program pemerintah dalam penciptaan wirausaha baru dan penguatan ekosistem kewirausahaan daerah.	Kondisi ekonomi dan persaingan usaha yang menuntut kapasitas adaptasi tinggi dari wirausaha baru.	Penguatan jejaring dan kemitraan usaha, termasuk akses ke pasar dan lembaga pembiayaan.
23. Kualitas kelembagaan dan Kinerja usaha yang semakin meningkat.	Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi menurun sehingga jumlah volume usaha yang tercatat juga menurun .	Pembinaan dan pengembangan koperasi melalui peningkatan kapasitas SDM (pelatihan/bimtek), fasilitasi dan pendampingan akses pembiayaan dan kemitraan usaha.
24. Jumlah koperasi yang semakin meningkat membuka peluang bagi koperasi untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.	Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi (digitalisasi) oleh koperasi.	Ketersediaan dan Pembaharuan data koperasi melalui Online Data System (ODS) sebagai sebagai salah satu faktor dalam menyusun kebijakan.
25. Komitmen pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi.	1. Inovasi Usaha terbatas, sebagian besar usaha koperasi bergerak di sektor keuangan sehingga perputarannya relatif lambat. 2. Kondisi perekonomian dan persaingan usaha.	
26. Efektivitas Layanan Perizinan Berbasis Digital (OSS-RBA)	Keterbatasan Infrastruktur Pendukung di Sektor Potensial Non-ESDM: Meski realisasi total tinggi, analisis sektoral menunjukkan investasi masih sangat terkonsentrasi di sektor ESDM. Hambatan pada sektor-sektor potensial lain seperti kelautan/perikanan, pertanian modern, dan pariwisata skala besar seringkali terletak pada kesiapan infrastruktur dasar (akses jalan, listrik, air baku) yang belum optimal di lokasi-lokasi potensial, sehingga mengurangi daya tarik dan kelayakan investasi	
27. Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah: Kondisi sosial-politik Provinsi NTB yang kondusif dan aman memberikan kepastian dan rasa aman bagi investor, khususnya untuk investasi jangka menengah-panjang.	Kendala Teknis dan Administratif Sistem Pelaporan: Sebagaimana diidentifikasi sebelumnya, gangguan pada sistem OSS dan kendala teknis dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) turut menjadi penghambat. Kendala ini berpotensi menyebabkan data realisasi tidak tercatat secara maksimal dan dapat mengganggu pengambilan keputusan investasi yang tepat waktu, baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah.	
28. Adanya anggaran dari kementerian pertanian	Adanya serangan hama dan penyakit tanaman	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sudah melakukan program pelatihan dan penyuluhan, penyediaan infrastruktur serta mekanisasi pertanian.
29. Adanya cetak sawah	Adanya DPI (Dampak Perubahan Iklim)	
30. Adanya optimasi lahan (OPLA)		

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA MENGATASI
31. Intervensi pemerintah dengan adanya bantuan kepada kelompok ternak; Peran aktif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada peternak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan; NTB memiliki pangsa pasar yang besar untuk penjualan ternak ke luar daerah dan didukung permintaan yang tinggi (kebutuhan pada Hari Raya Idul Adha dan permintaan dari provinsi lain); Status bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang memberikan keunggulan komparatif dan daya saing untuk ekspor ternak keluar daerah (bebas brucellosis, bebas Septicaemia Epizootica (SE) di Pulau Lombok); Target produksi tercapai karena adanya program MBG, sehingga masyarakat meningkatkan produksinya	Harga pakan yang masih tinggi berpengaruh terhadap biaya produksi ternak; Sebagian besar peternakan di NTB masih dalam skala kecil, dengan manajemen pengelolaan yang masih tradisional; Kelembagaan petani ternak yang masih lemah dan membutuhkan penguatan; Berkurangnya lahan pertanian/padang rumput akibat alih fungsi lahan yang dapat menurunkan ketersediaan pakan alami; Terbatasnya alat angkut ternak ke luar daerah; Masih rendahnya Unit Usaha/Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat halal dan NKV	Melakukan Pengawasan terhadap pakan yang beredar; Melakukan Bimbingan Teknis Pengolahan Pakan Berkualitas kepada kelompok ternak penerima bantuan sebanyak 200 orang; Penguatan Kelembagaan berbasis kelompok dan korporasi; Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi telah menetapkan Kawasan Peternakan dalam KLHS (SK Bupati/Perda/Pergub); Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pelaku Usaha/Unit Usaha tentang Sertifikat Halal dan NKV; Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk fasilitasi alat angkut ternak tol laut
32. Penurunan Target Kapabilitas APIP dikarenakan perubahan pedoman penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP melalui Perban BPKP Nomor 6 Tahun 2025, juga diperjelas dengan Surat Kepala BPKP yang menghimbau penyesuaian target kinerja pada seluruh dokumen perencanaan yang indikator Kapabilitas APIP	Target tahun 2025 untuk Kapabilitas APIP menyesuaikan dengan target yang telah tercantum pada Renja Perubahan 2025	Realisasi Sasaran Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Dimensi Evaluasi masih dalam proses penilaian oleh Itban
33. Partisipasi aktif yang intensif dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota maupun organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada Provinsi NTB	Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait
34. Adanya pemahaman anggota Linmas yang ada di Desa/Kelurahan terhadap bidang tugas	Masih kurangnya koordinasi dengan OPD pengampu Perda dan Perkada yang mengandung sanksi	Melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu Perda dan Perkada yang mengandung sanksi
35. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengamanan dan patroli Trantibumlinmas	Masih lemahnya pengawasan dan sosialisasi pelaksanaan Perda dan Perkada yang mengandung sanksi	Melakukan pengawasan dan pemantauan posko Linmas di Desa/Kelurahan
36. Pemenuhan indikator penerimaan layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar		Pelaporan Kinerja SPM per-triwulan melalui aplikasi E-SPM Kemendagri
37. Adanya keterlibatan pihak aparat Desa/Kelurahan yang memberdayakan anggota Sattinmas dan Badan Keamanan Desa dalam rangka menjaga Trantibumlinmas		Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap tingkat rasa aman di lingkungan tempat tinggal dengan hasil melampaui target yang telah ditetapkan
38. Partisipasi dan peran serta masyarakat di tingkat RT/RW dalam menjaga Kantibmas/Trantibumlinmas		Telah dilakukan peningkatan kapasitas anggota Linmas di 8 Kab/Kota se-Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebanyak 240 orang anggota Sattinmas.
39. Perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan kinerja serta kebutuhan DPRD		
40. Koordinasi dan sinergi yang baik antara pimpinan, anggota DPRD dan seluruh perangkat sekretariat DPRD		
41. Terfasilitasinya dukungan sarana dan prasarana, anggaran, dan		

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA MENGATASI
administrasi dalam pelaksanaan tugas DPRD		

3.3.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi NTB

IKD dan IKK merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih operasional dan terdesentralisasi. IKD mengukur kinerja daerah secara agregat (regional performance indicators) yang mendukung pencapaian IKU, sementara IKK adalah indikator kunci (key performance indicators) yang spesifik per OPD sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pada tahun 2025, IKD dan IKK menjadi dasar penyusunan Renstra-PD dan Renja-PD setiap OPD. IKD mencakup indikator lintas-OPD yang mendukung sasaran pembangunan daerah (misalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik atau efisiensi belanja daerah) sedangkan IKK bersifat output-oriented dan terukur per perangkat daerah.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebagaimana dijabarkan kedalam Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025, terdapat 252 Indikator Kinerja Daerah Provinsi NTB terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi sebanyak 15 Indikator, Aspek Kesejahteraan Masyarakat sebanyak 39 Indikator, Aspek Daya Saing sebanyak 37 Indikator, Aspek Pelayanan Umum sebanyak 20 Indikator, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 136 Indikator.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2025, dari 252 Indikator Kinerja Daerah, terdapat 125 indikator atau 49,60% sesuai bahkan melampaui target kinerja, dan 102 indikator atau 40,48% belum memenuhi target, serta masih terdapat 25 indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya karena belum ada rilis dari Lembaga terkait.

Pada Aspek Geografi dan Demografi terdapat beberapa indikator dengan tingkat capaiannya melampaui target diantaranya Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun. Sedangkan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdapat beberapa indikator dengan tingkat capaiannya melampaui target

diantaranya, Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, Tingkat Penyerapan Lulusan SMK, Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan, Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, dan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

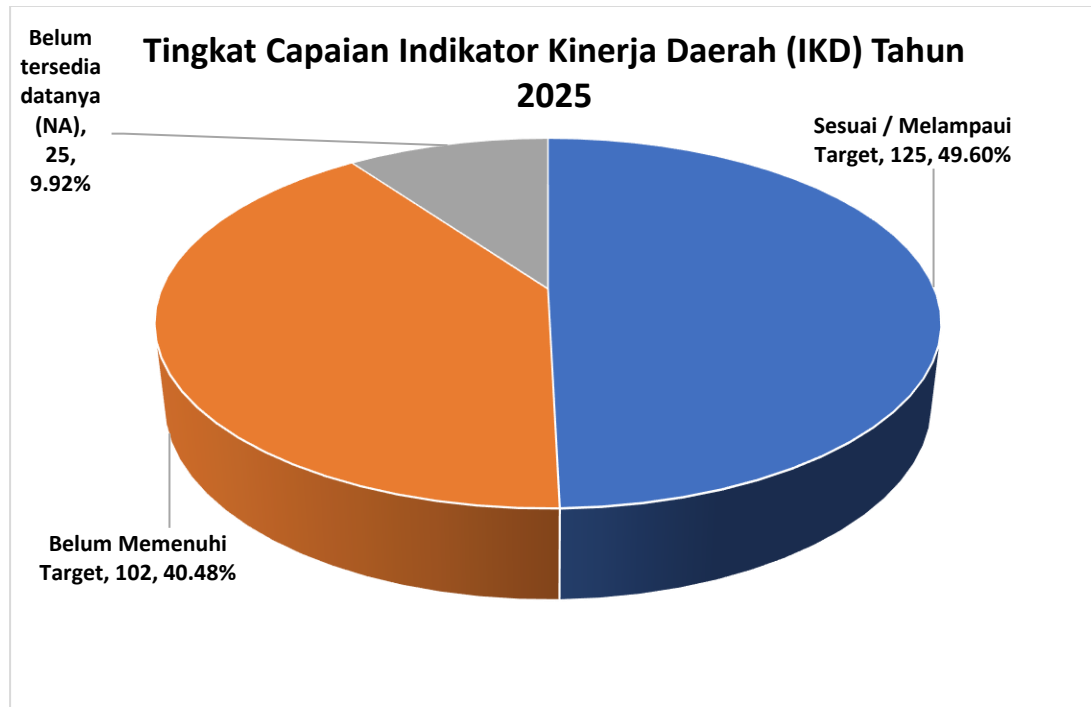
Sementara itu, pada Aspek Daya Saing, terdapat beberapa indikator dengan tingkat capaian melampaui target diantaranya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara, Rasio kewirausahaan Daerah, Indeks Kapabilitas Inovasi, Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ekspor Barang dan Jasa, Persentase Desa Mandiri, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Tingkat Inflasi, Total Dana Pihak Ketiga/PDRB, Aset Dana Pensiun/PDRB, Total Kredit/PDRB, Jumlah Kerjasama Provinsi, Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi, dan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Adapun Aspek Pelayanan Umum terdapat beberapa indikator dengan tingkat capaiannya melampaui target diantaranya Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pemerintah Digital, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Opini BPK atas LKD, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan tingkat capaian sesuai bahkan melampaui target kinerja sebanyak 78 indikator atau mencapai 57,35%. Beberapa indikator dengan tingkat capaian melampaui target diantaranya Peningkatan Produksi Perkebunan, Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi, Peningkatan produksi tanaman pangan, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat di 4 Kawasan transmigrasi, Persentase

Fasilitasi Kerjasama Desa, Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan, Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi, Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar, Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), Persentase peningkatan investasi di provinsi, Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19), Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah, Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Indeks Keamanan Informasi, Pertumbuhan Wirausaha, Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja, Kinerja lalu lintas provinsi, Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Survei Kepuasan Masyarakat, Realisasi Total terhadap Target Investasi, Nilai Ekspor Barang Per Provinsi, Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah, Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi, Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi, Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS), Rasio Konektivitas, Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi, Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum), Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS), Tingkat Kematangan UKPBJ, Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1, terselesaikannya kasus tanah garapan belum

bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi, Tersedianya RTKD Provinsi yang masih berlaku, Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS), Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan, Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan, Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah, Persentase pertumbuhan Kunjungan wisatawan, Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Persentase Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Implementasi Corporate University (CORPU), Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah, Persentase Penetapan RanPerda Tahun N, Persentase penanganan tanggap darurat bencana, Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi, Persentase penanganan pasca bencana, Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana, Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB, Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi, Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual, Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik, Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Persentase Fasilitasi Penataan Desa, Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku, Persentase Desa Maju dan Mandiri di 4 Kawasan Transmigrasi, Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif, Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial, Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N, Kesesuaian antara RKPD dengan APBD,

Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun, Indeks Pembangunan Statistik (IPS), serta Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah



Berikut capaian dari IKD dan IKK sampai dengan Triwulan IV tahun 2025.

Tabel 17 Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)						
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.44	78.83	74.70	94.76
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	2.74	1.98	2.67	65.02
3	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	709	751	747.74	99.57
4	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	192.23	123.53	64.26
5	Kapasitas air baku	m3/detik	3.53	3.73	3.53	94.64
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa	%	21.09	35.83	36.21	101.06
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6.84	8.00	2.52	31.50
8	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	20.00	27.37	136.85
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	45.00	64.00	52.55	82.11
10	Persentase Penurunan Emisi GRK					
a.	Kumulatif	%	NA	11.53	4.40	38.16
b.	Tahunan	%	NA	19.83	4.89	24.66
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113.64	135.41	156.02	84.78
12	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.56	0.59	0.55	93.22
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.78	76.19	77.40	101.59

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
14	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	%	1.6	1.59	1.58	100.63
15	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	NA	0.536	NA	NA
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
	- Dengan Tambang	%	5.30	6.00	3.22	53.67
	- Non Tambang	%	3.87	6,00 - 6,50	8.33	128.15
2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.83	0.84	0.82	100.00
3	Tingkat Kemiskinan	%	11.91	11,68-12,18	11.38	102.57
4	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32.28	35.8	33.67	94.05
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73 (Per Agustus)	2,19-2,79	3.05	90.68
6	Rasio Gini	Poin	0.364	0,369-0,373	0.364	101.36
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,54 (2023)	0.56	NA	NA
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72.25	72.92	72.60	99.56
9	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	257 (SP 2020)	184	257	60.33
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29.8	21.7	13.39	138.29
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99.6	99.31	99.66	100.35
12	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	78.48	80	82.99	103.74
13	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	29.37	22.84	29.37	71.41
14	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	NA	36	26.13	72.58
15	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	60.00	80.00	73.60	92.00
16	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	NA	20.00	7.0	35.00
17	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	58.30	60.70	58.30	96.05
18	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2.37	2.34	2.36	99.15
19	Insidensi Tuberkulosis					
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	58.96	85.00	61.11	71.89
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	88.53	95	86.71	91.27
20	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,87	8,6-8,63	8.87	102.78
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.98	14,1-14,13	13.99	99.22
22	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					
	a) Literasi Membaca	%	NA	10	NA	NA
	b) Numerasi	%	NA	0,00- 10,00	NA	NA
23	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					
	a) Literasi Membaca	%	NA	26,24-28,74	NA	NA
	b) Numerasi	%	NA	22,68-25,18	NA	NA
24	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9.44	10.02	11.63	116.07
25	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	84.07	84.68	86.71	102.40
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68.04	70.34	65.69	93.39
27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	37.16	28.65	38.81	135.46
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	71.4	71,68 - 71,7	NA	NA
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,37 (Tahun 2023)	58,64-58,78	NA	NA

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
30	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	59,99 (Tahun 2023)	61.14	66.51	108.78
31	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	65.51	66.71	63.70	95.49
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.53	0.517	0.515	99.61
33	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91.54	91.77	91.91	100.15
34	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,67 (Tahun 2023)	53.94	55.50	102.89
35	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	NA	35	35	100
36	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	2	3	2	66.67
37	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	NA	74.63	NA	NA
38	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	50.78	53.32	58.79	110.26
39	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	29.49	29	31.48	108.55
III ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3.87	4.21	6.69	158.91
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1.54	3.2	5.03	157.19
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.75	2.03	1.81	89.16
4	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	12,79 (Share PDRB Ekraf terhadap Provinsi (%))	0.39	NA	NA
5	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349,447	382,813	509,171	133.01
6	Rasio kewirausahaan Daerah	%	0.12	2.37	10.03	423.40
7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63.4	76.5	73.25	95.75
8	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3.27	3.5	3.89	111.14
9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	NA	51.15	NA	NA
10	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	NA	54.53	50.73	93.03
11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17.43	23.50	25.07	106.68
12	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,74 (Tahun 2023)	5.7	5.88	103.16
13	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	7.3	16.21	-22.05
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	31.8	36.9	34.31	92.98
15	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	35.21	24,53-24,55	30.42	123.91
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	75,83 (Tahun 2024)	76.21	70.12	92.01
17	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67.74	71,68-71,7	71.49	99.73
18	Persentase Desa Mandiri	%	39.57	41.14	48.78	118.57
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1.87	1.44	1.70	118.06
20	Tingkat Inflasi	%	1.28	3-3,7	3.01	100
21	Indeks Kota Berkelanjutan	%	NA	60	NA	NA
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	NA	24.62	26.94	109.41
23	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	NA	0.15	0.24	159.04
24	Nilai Transaksi Saham per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	Miliar Rupiah	NA	1,099,427.73	900,799.31	81.93
25	Total Kredit/PDRB	%	NA	38	40.94	107.74
26	Inklusi Keuangan	%	NA	88.7	80.51	90.77
27	Jumlah Kerjasama Provinsi	%		10	27	270.00

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
28	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	3.01	3.03	NA	NA
29	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	NA	0.19	0.21	110.53
30	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%	NA	8.95	NA	NA
31	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	NA	2.15	2.17	100.93
32	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0.95	0.97	0.93	95.97
33	Return on Asset (ROA) BUMD	%	NA	1.91	NA	NA
34	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	20,258	21,185	NA	NA
35	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	14.97	15.26	15.34	NA
36	Indeks Zakat Nasional	Poin	0.56	0.59	0.51	86.44
37	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	91.47	91.50	87.39	95.51
IV ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Nilai SAKIP	Nilai	72,88 (BB)	74,01 (BB)	70.92	95.82
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks (Kategori)	77.99	78,77 (BB)	77.46	98.34
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77.74	70	96.54	137.91
4	Indeks Pemerintah Digital	Skor	NA	1.78	1.99	111.80
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.56	3.50	4.20	120.00
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.42	4.03	4.41	109.43
7	Indeks Integritas Nasional	Indeks	NA	71.99	64.93	90.19
8	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	NA	65	59.00	90.77
9	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	27.03	70	70.45	100.65
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	70.22	72	82.89	115.13
11	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76.37	75,37-78,63	75.27	99.87
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.5	3.55	3.53	99.44
13	Indeks Transformasi Digital Nasional	Skor	45,85 (Tahun 2022)	46.55	NA	NA
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks		77.5	86.06	111.05
15	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	NA	65	45.79	70.45
16	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	2.826	2.927	NA	NA
17	Opini BPK atas LKD	Opini	WTP	WTP	WTP	100
18	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Nilai	78,4 (2023)	82.92	NA	NA
19	Nilai Sistem Merit	Nilai	264.5	292	284.5	97.43
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86.03	84.3	88.80	105.34
INDIKATOR KINERJA KUNCI						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
1 PENDIDIKAN						
1	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	%	98.65	98.70	99.37	100.68
2	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	%	92.48	92.50	92.51	100.01
3	Kemampuan Literasi SMA	%	64.78	65.38	64.78	99.08
4	Kemampuan Literasi SMK	%	58.58	59.88	58.57	97.81
5	Kemampuan Literasi SDLB	%	54.18	55.78	54.17	97.11
6	Kemampuan Literasi SMPLB	%	61.53	62.03	61.53	99.19
7	Kemampuan Literasi SMALB	%	61.92	62.42	61.92	99.20
8	Kemampuan Numerasi SMA	%	55.43	57.03	55.42	97.18
9	Kemampuan Numerasi SMK	%	51.58	53.78	51.57	95.89
10	Kemampuan Numerasi SDLB	%	50.79	51.39	50.78	98.81

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
11	Kemampuan Numerasi SMPLB	%	59.4	59.65	59.39	99.56
12	Kemampuan Numerasi SMALB	%	59.22	59.72	59.21	99.15
13	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	41.14	44.1	NA	NA
2	KESEHATAN					
	Persentase Pelayanan Kesehatan					
1	pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%	100	100	100	100
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100	100	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi	%	40	40.29	40.05	99.40
2	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	%	62.93	65.53	65.59	100.09
3	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	15.00	18.00	NA	NA
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman	%	5.56	6.00	2.32	38.67
5	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	75.54	76.04	75.31	99.04
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	5.19	6.00	2.00	33.33
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	99.61	99.62	99.69	100.07
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100
3	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	16.67	33.33	33.33	100
4	persentase penanganan pra bencana	%	100	100	60.00	60.00
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100
6	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100
6	SOSIAL					
1	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	25.00	30.00	45.27	150.90
7	TENAGA KERJA					
1	Tersedianya RTKD Provinsi yang masih berlaku	%	40	0	10	100
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70	75	80	106.67

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
3	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	50.78	53.32	51.63	96.83
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	22.57	23.7	34.18	144.22
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	%	67.47	70.84	106.08	149.75
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	27.73	29.12	89.95	308.89
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100
9	PANGAN					
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	40.38	52.42	58.8	112.1
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4.27	4.27	0	200
10	PERTANAHAN					
1	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100
2	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100
11	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	75.78	76.19	77.40	101.59
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	3.12	3.12
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	%	74.15	74.89	68.5	91.47
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	50.79	30.00	29.69	98.97
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	11.66	11.76	44.37	377.30
3	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	100	100	100	100
4	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	100	100
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.37	2.34	2.36	99.15
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	60.20	60.80	59.10	97.20
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5.90	5.57	11.84	-12.57
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	kelahiran per 1000 perempuan	37.80	32.68	25.50	121.97
15	PERHUBUNGAN					
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0.82	0.830	0.831	100.12
2	Kinerja lalu lintas provinsi	Km/Jam	NA	30	32	106.67

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	NA	2.22	NA	NA
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	0	0	0
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	0	7.89	8.33	105.58
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	81.71	81.75	74.76	91.45
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	NA	5.05	4.14	81.98
2	Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	36.83	37.75	38.37	101.64
3	Proporsi Usaha Kecil Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	63.03	63.03	31.64	50.20
4	Pertumbuhan Wirausaha	%	4.49	4.49	4.89	108.91
18	PENANAMAN MODAL					
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	36.75	12.00	16.80	140.00
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	104.28	104.28
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	Indeks	53,67 (Tahun 2023)	53.94	55.50	102.89
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	0.06	0.07	0.01	14.29
20	STATISTIK					
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Skor	2.77	2.77	2.77	100
21	PERSANDIAN					
1	Indeks Keamanan Informasi	Skor	437	456	505	110.75
22	KEBUDAYAAN					
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100
2	Persentase kenaikan Jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	%	52	54	NA	NA
23	PERPUSTAKAAN					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	60.42	61.00	31.77	52.08
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65.67	65.92	61.19	92.82
24	KEARSIPAN					
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70.08	70.5	68.9	97.73
25	URUSAN PILIHAN					
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	248,580.72	251,066.00	255,508.96	101.77
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	968,165.67	980,889.00	997,210.65	101.66
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	100	100	90.00	90.00
26	PARIWISATA					
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1.75	2.03	1.83	90.15
2	Persentase pertumbuhan Kunjungan wisatawan	%	4.51	4.74	4.74	100
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0.39	0.39	4.33	1,110.26
4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	50.00	50.00	100
27	PERTANIAN					
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-5.86	0.56	6.39	1,141.07
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-13.92	1.00	-1.61	-161.00
3	Peningkatan Produksi Perkebunan	%	1.06	0.22	7.67	3,486.36
4	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	1.00	2.00	-2.38	-119
5	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	80.99	81.79	94.04	114.98

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
6	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	69.4	70.09	82.57	117.81
7	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari survey/lance penyakit dari 5 PHMS)	%	100	100	100	100
28	KEHUTANAN					
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	9.72	11.37	11.1	97.63
2	Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	%	6.73	7.03	3.92	55.76
3	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	100	100	100	100
4	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0.27	0.24	NA	NA
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100	100
30	PERDAGANGAN					
1	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	77.75	88	84.58	96.11
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi	%	100	100	100	100
3	Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	%	24.94	29.20	30.42	104.18
31	PERINDUSTRIAN					
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	%	4.19	4.21	76.37	1814.01
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi	%	3.87	3.89	6.69	171.98
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Orang	419926	341,328	324,130	94.96
4	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	US\$ Miliar	0.024	2.17	1.02	47.00
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Rp. Triliun	24.8	8.68	5.79	66.71
6	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	18.51	18.75	9.49	50.61
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
32	TRANSMIGRASI					
1	Persentase Desa Maju dan Mandiri di 4 Kawasan Transmigrasi	%	76.27	81.36	81.36	100.00
2	Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat di 4 Kawasan transmigrasi	%	NA	1.10	7.14	649.09
	FUNGSI PENUNJANG DAN PENGAWASAN					
33	SEKRETARIAT DPRD					
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%	NA	100	100	100
34	PERENCANAAN					
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100
2	Kesesuaian antara RKPD dengan APBD	%	100	100	100	100
35	KEUANGAN					
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	29.73	33.29	31.72	95.28
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	49.75	58.88	42.92	72.89

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	88.96	90.00	88.34	98.16
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	-1.62	3.00	0.66	22.00
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		21.7	35.11	36.16	102.99
6	Persentase Penurunan SILPA	%	38.15	31.00	-157.49	-508.03
36	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	66.28	67.94	69.77	102.69
2	Persentase Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Implementasi <i>Corporate University (CORPU)</i>	%	NA	50.00	50.00	100
37	KESBANGPOLDAGRI					
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	%	70.00	71.60	71.60	100
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	71.00	76.00	76.00	100
38	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	NA	50	60	120.00
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0.95	0.96	1	104.17
39	PENGAWASAN					
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level III -3.116	Integrated Level III 2.67	III 2.14	80.15 80.15
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level III -3.06	Terdefinisi (Level III) (3,00) 3.07	Level II (2.20) 2.20	73.33 71.66
3	Manajemen Risiko Indeks	indeks	3.213	3.219	2.659	82.60
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	84	89.89	89.89	100
40	PENGADAAN					
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	%	19.71	19.91	23.41	117.58
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	skor	22.65	22.88	22.65	98.99
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	9/9	9/9	9/9	100
41	PELAYANAN PUBLIK					
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Skor	85.03	85.12	85.03	99.89
2	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.03	84.30	88.80	105.34

Sumber: data diolah, 2026

BAB IV

PENUTUP

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2025 Triwulan IV menjadi masukan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya, termasuk sebagai gambaran efektifitas pelaksanaan perencanaan di Triwulan IV oleh masing-masing OPD pelaksana. Evaluasi RKPD Tahun 2025 ini mencakup capaian sasaran pokok pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi NTB, indikator kinerja utama OPD, indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci serta program dan kegiatan Triwulan IV yang digunakan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2025 dapat dicapai.

Melalui penjelasan mengenai pencapaian indikator pembangunan Pemerintah Provinsi NTB sesuai dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD, terlihat komitmen yang kuat dalam mengukur keberhasilan pembangunan secara makro dan outcome-oriented. Beberapa capaian penting pada tahun 2025 antara lain:

- Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 11,38 persen di tahun 2025, turun 0,53 persen dibandingkan tahun 2024.
- Pertumbuhan ekonomi mencapai 3,22 persen sepanjang tahun 2025 (termasuk sektor tambang) dengan pertumbuhan non-tambang yang lebih tinggi mencapai 8,33 persen, mencerminkan transformasi ekonomi yang mulai bergeser ke sektor produktif lainnya.
- Prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan signifikan menuju kisaran 16,4 persen pada akhir 2025, mendekati target nasional dan RPJMD.

Sementara itu, Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berfungsi sebagai mesin penggerak operasional yang memastikan setiap program dan kegiatan terukur, akuntabel serta selaras antar-perangkat daerah. Capaian IKD/IKK tahun 2025 menunjukkan

peningkatan layanan publik, konektivitas infrastruktur kepulauan serta efisiensi tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Dengan kerangka indikator kinerja yang jelas dan terintegrasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan berorientasi pada hasil. Tahun 2025 bukan sekadar tahun transisi melainkan momentum “Bangkit Bersama” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi) untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang lebih baik.

Keberhasilan RPJMD 2025-2029 sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, pemantauan berkala serta penyesuaian yang adaptif terhadap dinamika yang berkembang. Meskipun terdapat tantangan seperti fluktuasi sektor tambang, capaian tahun pertama ini memberikan optimisme yang kuat untuk pencapaian target yang lebih ambisius di tahun-tahun mendatang. Diharapkan, melalui sinergi dan kerja keras bersama, target-target ambisius yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga pada akhir periode 2029, NTB telah melangkah lebih maju menuju provinsi kepulauan yang makmur, mandiri, berdaya saing dan mendunia.